

**PROGRAM KLINIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
KOPERASI WANITA KARYA MANDIRI
DI DESA PLOSOKANDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Minat Utama Inovasi Pemerintahan**

Oleh :

ONI KRISHNATA

NIM : 135120607111018



PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN**Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas****Koperasi Wanita Karya Mandiri****Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung Tahun 2017****SKRIPSI****Disusun Oleh :****Oni Krishnata****NIM 135120607111018****Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada tanggal 9 Juli 2018****Tim Penguji:**

Ketua Majelis Penguji

**Fathur Rahman, S.IP., M.A**
NIK.2011098204291001

Sekretaris Majelis Penguji

**Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A**
NIK. 2018072712891001

Anggota Majelis Penguji 1

**Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si**
NIK. 2012096704092001

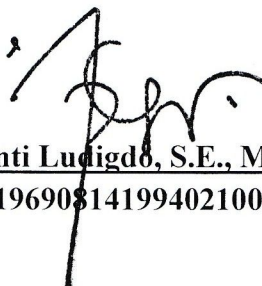
Anggota Majelis Penguji 2

**Tia Subekti, S.IP., M.A**
NIP. 199206202018032001

Malang, 9 Juli 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si. Ak**
NIP. 196908141994021001

HALAMAN PERNYATAAN

Nama: Oni Krishnata

NIM: 135120607111018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung Tahun 2017” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang termasuk di dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 9 Juli 2018

Yang Memberi Pernyataan



Oni Krishnata

NIM. 135120607111018

ABSTRAK

Oni Krishnata, 2018, Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, Dr.Dra.Alifiuhlatin, M.Si, Tia Subekti, S.IP., MA.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) memiliki peran meningkatkan pendapatan asli daerah dan bertujuan memperluas lapangan pekerjaan. Koperasi Wanita di daerah Tulungagung merupakan Koperasi yang pesat dan bagus perkembangannya dari tahun ke tahun. Akan tetapi meskipun berkembang pesat, banyak permasalahan yang ditemui berkaitan dengan kelembagaan, usaha dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut terbentuklah suatu strategi, yaitu Program Klinik. Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan strategi terbaru yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini mengetahui strategi, faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, *pertama* Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas dilakukan dengan pengembangan KUMKM melalui pembinaan yang dilakukan secara berkala, pemberian layanan konsultasi, pemberian sarana dan prasarana yang memadai, pemberian informasi tepat guna, serta pemberian bantuan advokasi bisnis dan layanan pelatihan singkat. *Kedua*, terdapat faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat terlaksananya Program Klinik. Faktor internal meliputi SDM kurang memadai, terbatasnya alokasi dana anggaran, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah tercukupi. Faktor eksternalnya meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pinjaman, serta kurang tertariknya masyarakat dalam mengembangkan usahanya karena kurangnya modal.

Kata kunci: Strategi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi Wanita, Program Klinik.

ABSTRACT

Oni Krishnata, 2018, Clinic Program to Improve the Quality of Woment's Koperasi at Plosokandang Village Tulungagung District 2017, Dr.Dra.Alifiuhlatin, M.Si, Tia Subekti, S.IP., MA.

Cooperatives and Micro small medium (KUMKM) has the role of a genuine regional and income increase was aimed at expanding employment. Women's cooperative in the area of Tulungagung is rapid and good Cooperative Development from year to year. However, although growing rapidly, many of the problems encountered with regard to the institutional, business and human resources. To fix the issue is making a strategy, i.e. the Program clinic. The clinic program cooperatives and Micro small medium renewable strategy is used by the Department of cooperatives and Micro Small medium-sized province of East Java. The purpose of this research is to know the strategies, factor endowments and a barrier to Service cooperatives and Micro small medium Tulungagung District through the Clinic program in realizing cooperative. The theory used in this research is the theory of community empowerment. This type of research is qualitative, descriptive. Data collection techniques on this research are observation, interview and documentation. The research results obtained are the first strategy of the Department of cooperatives and Micro small medium (KUMKM) through the course of Tulungagung district Clinics in realizing the cooperative development is carried out by a qualified KUMKM through coaching done regularly, the granting of consulting services, the granting of adequate infrastructure and facilities, the granting of appropriate information, as well as supplying business advocacy and training service brief. Second, there are internal and external factors that support and hinder the implementation of the Program clinic. Among the internal factors that impede the implementation of the program of clinics are inadequate human resources, the limited allocation of budget funds, while for facilities and infrastructure already would be sure. External factors i.e., the low level of public awareness in paying loans, as well as the less her community in developing its business due to lack of capital.

Key Word: Strategy, Department of koperasi and small-medium enterprises micro enterprises, Woman's Koperasi, The Clinic Program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bryson, John. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal.108.
- Djatnika, Tjetjep. 2007. "Efektivitas Strategi Penjualan : Kunci Keberhasilan Suatu Kantor Cabang Penjualan." Jakarta: Manajemen Usahawan Indonesia.
- Hatten, K. J. and Hatten, M. L. "Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability," *Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc, 1996
- Hendar, Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi*. Edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE –UI
- Kuncoro, Mudrajat . 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mintzberg, Henry & James Brian Quinn. 1992. *The Strategy Process Concepts and Contexts*. New Jersey : Prentice Hall Inc
- Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
- Pearce dan Robinson.2008. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Rangkuti, F., 1998. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Revrison Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Riyanto, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketujuh*, Yogyakarta : YBPFE UGM.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba,. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.

Wheelen, Thomas L dan Hungger, J. Davis, (1995), Strategic Management and Bussiness Policy, Singapore, Addison Wessley.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online),

(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 15 januari 2018

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online),

(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 15 januari 2018.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online),

(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 15 januari 2018.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi. (Online) (Http: awasikoperasi.depkop.go.id) diakses pada 15 januari 2018.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi pasal 4 ayat 1

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008. (Online),

(<http://p2t.jatimprov.go.id/sektor-koperasi-amp-umkm.html>) diakses pada 15 januari 2018.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

UU 20 Tahun 2008 UMKM. (Online) (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>) diakses pada 15 januari 2018.

Jurnal dan Penelitian

Erawan, I Nyoman. 1994. Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi. Denpasar: PT. Upada Sastra

Faustino Cordoso Gomes. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Hehanusa, Gerlan. 2013. Pengaruh Self Assessment System dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta. UPN “Veteran” Yogyakarta. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3) Vol 3, No 1 (2013)

Hidayat, Iman Pirman & Fadillah, Adi Ridwan. 2009. *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Operasional*. Tesis.

Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora

Kamalin, Jumrotul. 2015. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang). Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Maling Ibrahim Malang.

Keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/KEP/M/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi

Ndraha, Taliziduhu, 1999, Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Neddy, Rafinaldy. 2006. *Memeta Potensi Dan Karakteristik UMKM Bagi Pertumbuhan Usaha Baru*. Infokop Nomor 29.

Permeneg Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi

- Putra, Abdul Hakim Pranata. 2010. Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif di Jawa Tengah. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro
- Sutrisno, Joko & Sri Lestari. 2006. *Kajian Usaha Mikro Indonesia Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I-2006*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung”**. Penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti sebagai syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung dan Koperasi Wanita Karya Mandiri. Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan dalam segala hal yang terbaik bagi penulis.
2. Dr. Dra. Hj. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk mengambil tema skripsi ini.
3. Tia Subekti, S.IP., MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan dan nasehat bagi penulis dalam perbaikan maupun penyempurnaan skripsi yang dibuat oleh penulis.

4. Joko Purnomo S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Seluruh nara sumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan memberikan data yang berguna bagi skripsi penulis.
6. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi hingga penulisan skripsi selesai.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teori.....	35
2.2.1 Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	35
2.2.2 Koperasi	41
2.2.3 Klinik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	55
2.3 Alur Pemikiran	58
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Lokasi dan Situs Penelitian	60
3.3 Fokus Penelitian	60
3.4 Jenis dan Sumber Data	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.5.1 Metode Observasi.....	62
3.5.2 Metode Wawancara.....	62
3.5.3 Metode Dokumentasi	63
3.6 Teknik Pemilihan Informan	64
3.7 Teknik Analisis Data.....	65
	58
 BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Wilayah	68
4.2 Gambaran Umum Koperasi.....	68
4.3 Gambaran Umum Program Klinik	69

4.3.1	Layanan Klinik KUMKM	70
4.4	Tujuan Terbentuknya Program Klinik.....	74
4.5	Struktur Organisasi Klinik.....	75

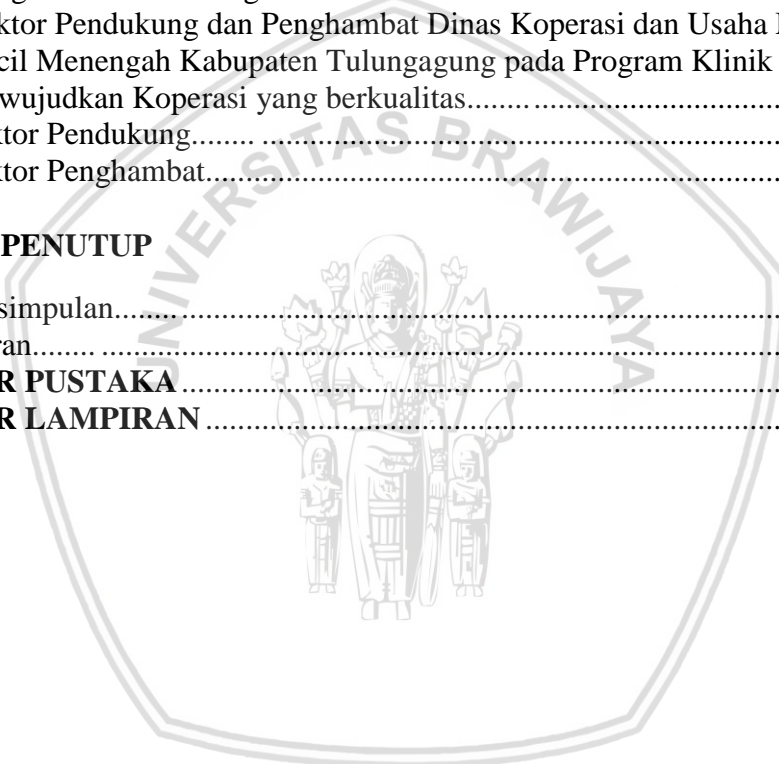


BAB V STRATEGI MEWUJUDKAN KOPERASI WANITA BERKUALITAS MELALUI PROGRAM KLINIK

5.1	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung Melalui Program Klinik dalam Mewujudkan Koperasi Yang Berkualitas.....	76
5.2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	78
5.2.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	78
5.2.2	Pemberian Modal Usaha (Permodalan)	87
5.2.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana.....	94
5.2.4	Penyedia Informasi Tepat Guna.....	97
5.2.5	Pengelolaan Kelembagaan.....	100
5.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada Program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas.....	103
5.4.1	Faktor Pendukung.....	103
5.4.2	Faktor Penghambat.....	106

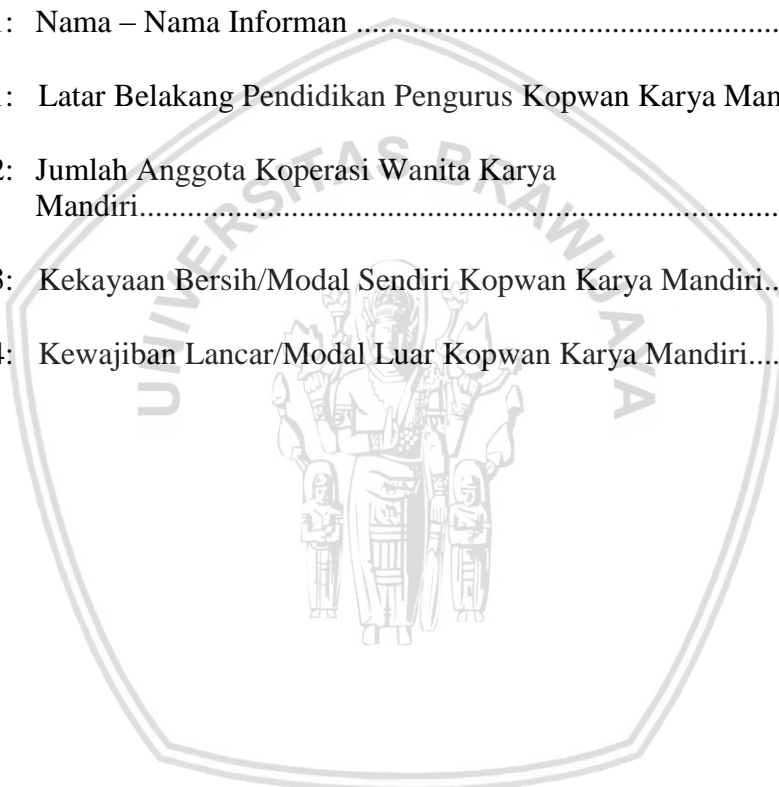
BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	107
6.2	Saran.....	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	DAFTAR LAMPIRAN	114



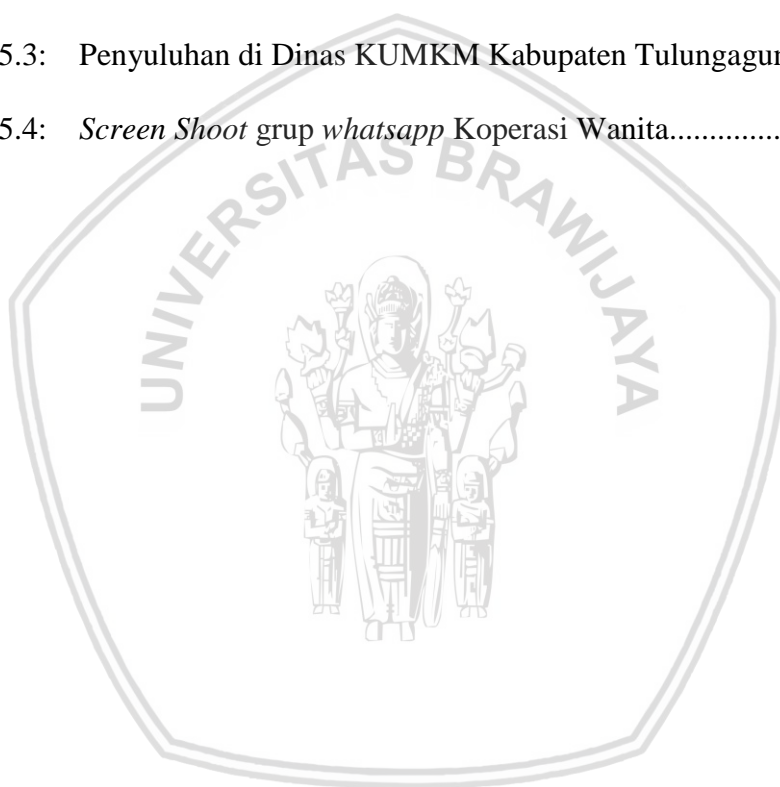
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah dan Perkembangan Koperasi Wanita Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar Tahun 2015, 2016 dan 2017.....	9
Tabel 1.2: Nama Koperasi Wanita di Kecamatan Kedungwaru	11
Tabel 2.1: Kajian Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1: Nama – Nama Informan	64
Tabel 5.1: Latar Belakang Pendidikan Pengurus Kopwan Karya Mandiri	79
Tabel 5.2: Jumlah Anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri.....	91
Tabel 5.3: Kekayaan Bersih/Modal Sendiri Kopwan Karya Mandiri.....	93
Tabel 5.4: Kewajiban Lancar/Modal Luar Kopwan Karya Mandiri.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Koperasi Wanita Karya Mandiri	13
Gambar 3.1: Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman.....	65
Gambar 4.1: Struktur Program Klinik.....	76
Gambar 5.2: Pembinaan di Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung.....	79
Gambar 5.3: Penyuluhan di Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung.....	82
Gambar 5.4: <i>Screen Shoot</i> grup whatsapp Koperasi Wanita.....	99



DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Advokasi	: Suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan publik serta mendapatkan komitmen dengan berbagai macam pola komunikasi secara persuasif yang menggunakan ketepatan informasi.
APUPKW	: Ajang Pengembangan Usaha Koperasi Wanita adalah pagelaran atau pameran tentang pengenalan produk-produk usaha yang dimiliki oleh anggota dari Koperasi tertentu.
Aset	: Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang dapat diukur secara jelas menggunakan satuan uang baik berupa benda ataupun hak kuasa.
Audit	: Kegiatan mengevaluasi bukti mengenai informasi dalam menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh seseorang yang berkompeten.
Bimtek	: Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi melalui materi tertentu.
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Investasi	: Penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan dalam jangka waktu tertentu agar memperoleh imbal balik keuntungan yang lebih besar di masa depan.

Kohesivitas	: Keinginan yang mendorong setiap anggota dalam mempertahankan keanggotaanya untuk tetap tinggal dalam kelompok tersebut agar tidak mencari kelompok baru.
Koperasi	: Suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan.
Koperasi Wanita	: Suatu badan usaha yang dibentuk oleh sekumpulan kaum perempuan yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian keluarga.
KUMKM	: Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara karena menciptakan lapangan pekerjaan.
Loka Karya	: Sebuah acara atau pertemuan yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang yang ahli dalam bidang tertentu dan bertujuan untuk membahas suatu permasalahan serta mencari solusinya.
Omset	: Jumlah pemasukan uang yang berasal dari hasil penjualan barang dagang atau jasa.
Program Klinik KUMKM	: Program yang dibentuk oleh Dinas KUMKM Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk menunjang perkembangan Koperasi dalam mengatasi permasalahan melalui pelayanan pemberdayaan yang baik.
RAT	: Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap Koperasi karena di dalamnya membahas laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada anggota yang bersangkutan selama satu tahun.
Rentenir	: Seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi atau berlipat-lipat karena sifatnya

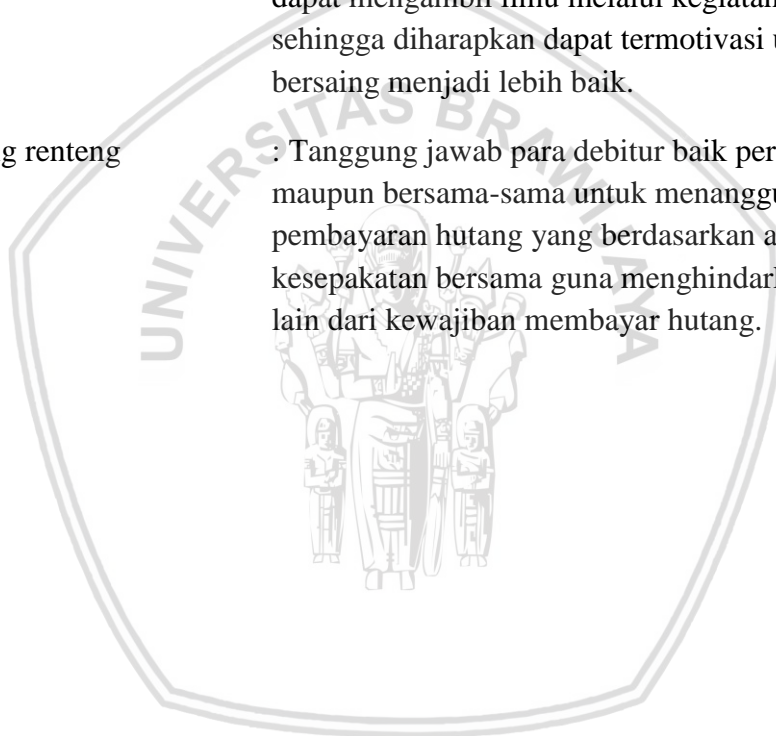
	yang tidak resmi, bukan seperti badan keuangan bank dll.
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program serta kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
SAK-ETAP	: Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan umum bagi pengguna eksternal.
SHU	: Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak yang bersangkutan dan harus dibagikan kepada anggota koperasi.
Simpanan Pokok	: Simpanan yang harus dibayarkan anggota Koperasi saat pertama kali menjadi anggota, hanya dilakukan sekali dan jumlahnya sama dan ditentukan oleh Koperasi terkait.
Simpanan Wajib	: Sejumlah simpanan tertentu yang besaran pembayarannya tidak harus sama antar anggota akan tetapi wajib dibayar oleh anggota sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Koperasi terkait.
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pengusaha untuk melaksanakan usahanya baik di bidang perdagangan maupun jasa.
SOM	: Standar Operasional Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan acuan atau panduan bagi pihak manajemen dalam memberikan

pelayanan bermutu untuk para anggota serta pengguna jasa.

SOP : Standar Operasional Prosedur adalah prosedur yang disusun untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil efektif dan memastikan operasionalnya berjalan dengan lancar yang berisi urutan proses pekerjaan dari awal sampai akhir.

Study Potensi Koperasi : Berkunjung ke Koperasi daerah lain yang dinilai lebih berkembang dengan baik dan diharapkan dapat mengambil ilmu melalui kegiatan tersebut sehingga diharapkan dapat termotivasi untuk bersaing menjadi lebih baik.

Tanggung renteng : Tanggung jawab para debitur baik perorangan maupun bersama-sama untuk menanggung pembayaran hutang yang berdasarkan atas kesepakatan bersama guna menghindarkan debitur lain dari kewajiban membayar hutang.



HALAMAN PERSETUJUAN

Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas

Koperasi Wanita Karya Mandiri

Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung

Tahun 2017

SKRIPSI

Disusun Oleh

Oni Krishnata

NIM 135120607111018

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si
NIK. 2012096704092001



Tia Subekti, S.IP., MA
NIP. 199206202018032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur perekonomian terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan bertujuan memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Guna mengembangkan potensi usaha kecil yang seluas-luasnya tidak cukup hanya dengan kebijakan pemerintah saja, akan tetapi harus tersedia sebuah lembaga pendukung yang mampu memberikan pelayanan berkualitas sekaligus dapat memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat khususnya para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada saat ini dalam sektor pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran penting karena merupakan jenis unit usaha yang banyak melibatkan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang penghasilannya tergolong rendah dalam mengurangi kemiskinan yaitu melalui cara peningkatan kapasitas usaha, keterampilan dalam pengelolaan usaha serta pembinaan usaha dari Pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi sebagai pilar perekonomian bangsa harus siap menghadapi tantangan persaingan yang terjadi. Hal ini sangat bergantung pada para pengelola koperasi yang diharapkan memiliki sifat proaktif serta inovatif dalam mengantisipasi segala permasalahan dengan berpegang teguh terhadap azas dan prinsip-prinsip koperasi. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan ditentukan dari kinerja koperasi itu sendiri. Penilaian kinerja koperasi dilandaskan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Peningkatan Koperasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai aspek badan usaha aktif, kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas serta partisipasi anggota, orientasi kepada pelayanan anggota, pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan peringkat kualifikasi koperasi yang dapat dilihat dari tingkat kualitasnya yaitu meliputi : sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas. Hasil peningkatan akan mencerminkan kondisi koperasi yang ditingkatkan, koperasi yang memiliki peringkat baik akan dapat merefleksikan kesehatan pengelolaannya serta kemampuan bisnis yang diterapkan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2015-2019, pada saat ini perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang secara umum positif. Dalam periode tahun 2010-2016, jumlah unit koperasi dan anggota koperasi terus meningkat tiap tahunnya.

Gambaran tersebut menunjukkan tentang kebutuhan terhadap kebijakan pemberdayaan koperasi yang difokuskan pada perbaikan dalam manajemen pengelolaan usaha serta peran aktif anggota perlu diperkuat untuk mempercepat kemandirian koperasi. Akan tetapi koperasi masih mengalami permasalahan yaitu berkaitan dengan organisasi, sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha. Harus dilakukan perbaikan agar potensi koperasi semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui upaya yang produktif, efektif dan efisien untuk mengurangi resiko yang akan merugikan koperasi itu sendiri. Hal di atas sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir keterbatasan model pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Salah satu upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur yaitu melalui cara membina, memberdayakan dan mengembangkan sektor koperasi agar kualitas koperasi dapat meningkat maka dibuat program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebuah lembaga pendukung yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Merupakan program penyediaan layanan pengembangan usaha terpadu dan komprehensif secara gratis, personal serta profesional kepada masyarakat dan bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

merupakan lembaga milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.

Lembaga tersebut mempunyai tugas pokok untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada pelaksanaannya lembaga ini menyediakan berbagai pelayanan publik yang berhubungan dengan dunia bisnis seperti informasi bisnis, pelayanan konsultasi bisnis, advokasi beserta pendampingan, pelatihan singkat, akses pembiayaan, akses pemasaran, pustaka entrepreneur, mobil Klinik KUMKM keliling, layanan IT entrepreneur dan layanan TV KUMKM Jatim Online. Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 poin 1.15.16.49. Dalam rangka meningkatkan standarisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pengembangan produk usaha dilaksanakan melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pusat informasi serta layanan pelatihan dan konseling yang handal untuk memuaskan pelanggan agar mampu membantu dalam peningkatan kualitas koperasi. Dengan perubahan struktur dari yang sederhana menjadi lebih terspesifikasi serta peningkatan jumlah pegawai yang berdasarkan pada kemampuan pegawai. Sehingga setiap posisi atau jabatan dipercayakan

kepada pegawai yang berkompeten sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Penyelenggaraan program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tulungagung juga didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.

Dimana dalam upaya meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dan lembaga pembiayaan lainnya. Sekaligus mengatasi rendahnya kualitas Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dan lembaga pembiayaan lainnya yang belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan serta masih kurangnya kepedulian. Dalam membantu pengembangan kinerja usaha pada sektor koperasi, maka dibentuk program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Fungsi dari program Klinik yaitu membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi serta bertujuan meningkatkan kualitas koperasi yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Sikula berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Mangkunegara mengemukakan bahwa pelatihan (*training*) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, mempelajari pengetahuan serta ketrampilan teknis dalam jangka waktu yang terbatas. Adapun metode yang biasanya digunakan dalam pelatihan antara lain *on the job training*, *vestibule*, demonstrasi dan contoh, simulasi,¹ *apprenticeship*, metode ruang kelas, metode seminar, kuliah, konferensi, serta

¹ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2006, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 50.

kursus singkat (*short course*). Pelatihan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis seseorang.

Provinsi Jawa Timur melaksanakan program yang berdasarkan pada penerapan serta strategi program guna meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di setiap daerah. Kabupaten Tulungagung merupakan contoh daerah yang menerapkan strategi program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dimana Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya pada Koperasi Wanita mulai memberikan pelatihan melaksanakan program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang diterapkan pada sistem perkoperasian. Sistem tersebut dapat membantu kinerja usaha guna meningkatkan kualitas yang ada dalam koperasi.

Pada proses pembinaan serta pelatihan, pemberian layanan harus sesuai dengan penerapan standar program Klinik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Program pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan pada Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah meliputi pemahaman tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kepegawaian, terbentuknya koperasi serta wirausaha baru, bertambahnya usaha mikro yang mulai memiliki izin, bertambahnya koperasi yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan penyusunan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan strategi terbaru yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur serta

diterapkan di beberapa daerah. Penerapan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipilih sebagai fokus penelitian karena sesuai dengan permasalahan koperasi yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, yaitu berkaitan dengan kelembagaan, usaha dan sumberdaya manusia. Dengan diadakannya penelitian mengenai program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, diharapkan agar permasalahan mengenai kelembagaan dsb. dapat teratasi sehingga terwujudlah Koperasi yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia No 21/Per/M.KUMKM/IX/2015 koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan berdasarkan prinsip-prinsip kohesivitas serta partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014–2018 maka difokuskan dengan melakukan berbagai strategi guna mewujudkan koperasi yang berkualitas. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan koperasi di Kabupaten Tulungagung yang terus meningkat jumlahnya pada tahun 2015 dan tahun 2016. Berdasarkan data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa jumlah

koperasi terdaftar sebanyak 1050, ditahun 2016 berjumlah 1162 koperasi yang terdaftar sedangkan pada tahun 2017 terdapat 998 koperasi terdaftar. Meskipun ditahun 2017 terjadi penurunan jumlah koperasi yang terdaftar akan tetapi hal tersebut berdasarkan pada proses penyeleksian oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung yang disesuaikan dengan kualitas koperasi masing-masing.

Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai standar program Klinik dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur maka termasuk dalam kategori koperasi yang tidak aktif. Oleh karena itu tidak dimasukkan pada daftar-daftar koperasi yang tergolong aktif. Hal menunjukkan bahwa berdasarkan dari aspek koperasi yang berkualitas, jumlah koperasi di Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan kualitas, khususnya pada perkembangan Koperasi Wanita. Berdasarkan dari keseluruhan jenis koperasi yang berada di Kabupaten Tulungagung, Koperasi Wanita memiliki jumlah yang tergolong banyak. Hal tersebut berdasarkan pada data perkembangan jumlah Koperasi Wanita tahun 2015, 2016 dan 2017 Kabupaten Tulungagung dibanding dengan yang ada di Kabupaten Blitar, dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Table 1.1
Jumlah dan Perkembangan Koperasi Wanita Kabupaten Tulungagung
dan Kabupaten Blitar tahun 2015, 2016 dan 2017

Kabupaten Tulungagung					Kabupaten Blitar			
No	Kecamatan	Tahun			Tahun			
		2015	2016	2017	Kecamatan	2015	2016	2017
1	Tulungagung	18	18	18	Kepanjen Kidul	10	10	10
2	Kedungwaru	23	23	23	Sanan Wetan	8	8	8
3	Sumbergempol	20	20	20	Sukorejo	7	7	7
4	Ngunut	18	18	18	Bakung	11	11	11
5	Rejotangan	16	16	16	Binangun	8	8	8
6	Tanggunganung	7	7	9	Doko	12	12	12
7	Besuki	11	10	11	Gandusari	13	13	13
8	Bandung	18	18	18	Garum	11	11	11
9	Boyolangu	13	18	18	Kademangan	8	8	9
10	Gondang	20	20	20	Kanigoro	6	6	6
11	Kauman	14	14	14	Kesamben	7	7	7
12	Karangrejo	14	14	14	Nglegok	13	13	13
13	Sendang	12	12	12	Punggungrejo	14	13	14
14	Pagerwojo	13	13	13	Ponggok	13	13	13
15	Pakel	19	19	19	Kulon	11	10	11
16	Campurdarat	9	9	10	Selopuro	10	10	11
17	Kalidawir	18	18	18	Selorejo	12	11	12
18	Ngantru	13	13	13	Srengat	8	8	8
19	Pucanglaban	9	9	10	Sutojoyan	9	9	10
					Talun	6	6	6
					Udanawu	7	7	7
					Wates	8	8	8
					Wlingi	11	10	11
					Wonodadi	8	8	8
					Wonotirto	11	11	11
Jumlah		285	289	294	Jumlah	242	238	245

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah Koperasi Wanita di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yaitu ditahun 2015 terdapat sebanyak 285 koperasi kemudian bertambah menjadi 289 koperasi pada tahun 2016 dan ditahun 2017 juga meningkat menjadi 294 koperasi wanita. Hal tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan perkembangan jumlah Koperasi Wanita di Kabupaten Blitar yang tidak stabil. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ditahun 2015 terdapat sebanyak 242 koperasi terdaftar, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah yaitu menjadi 238 koperasi terdaftar kemudian ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi sebanyak 245 koperasi terdaftar. Dari perbedaan kedua data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung lebih unggul pada aspek peningkatan kualitas yang dapat dilihat dalam perkembangan jumlahnya dibanding dengan Koperasi Wanita yang berada di Kabupaten Blitar.

Ditinjau dari segi wilayah maka Kabupaten Blitar yang memiliki wilayah lebih luas, seharusnya lebih memperhatikan dalam hal peningkatan kualitas Koperasi Wanita. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah koperasi yang ada. Sehingga ketersediaan dari jumlah koperasi akan sesuai dengan wilayah Kabupaten Blitar yang luas. Agar berbagai kebutuhan mampu terpenuhi serta permasalahan yang dikeluhkan masyarakat dan para pelaku koperasi di tiap Desa ataupun Kecamatan dapat terselesaikan secara cepat.

Table 1.2
Nama Koperasi Wanita di Kecamatan
Kedungwaru

No	Nama – Nama Koperasi Wanita Di Kecamatan Kedungwaru
1	Delima Putih
2	Mekar Sari
3	Siti Aisyah
4	Loh Jinawe
5	Mandiri Guyub Rukun
6	Sejahtera
7	Flamboyan
8	Langgeng Rejeki
9	Usaha Wanita Karya
10	Karya Mandiri
11	Lestari
12	Purnama
13	Srikandi
14	Khoirun Nisa
15	Sejahtera
16	Bunga
17	Arumdalu
18	Mawar
19	Sumber Kehidupan
20	Guyub Rukun
21	Rahayu
22	Berdikari
23	Wanita Krida

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung tahun, 2017.

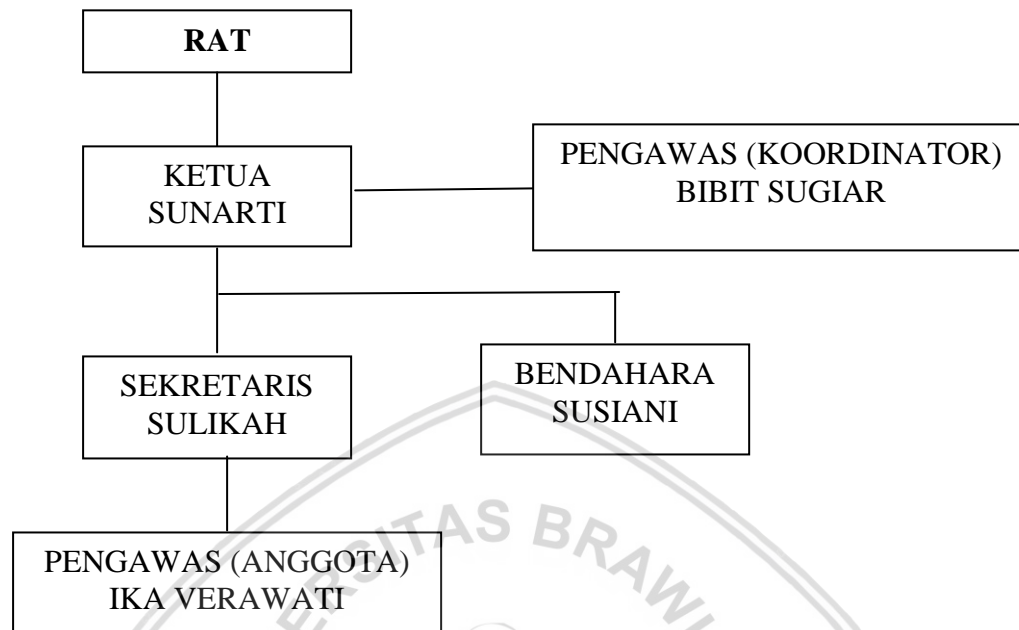
Tabel diatas adalah daftar nama-nama koperasi wanita yang berada di Kecamatan Kedungwaru. Dikarenakan pada penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu Koperasi Wanita Karya Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Kedungwaru tepatnya di Desa Plosokandang. Koperasi wanita tersebut telah memiliki kualitas yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung melalui perlombaan koperasi berprestasi yang diikuti oleh seluruh Koperasi Wanita. Koperasi Wanita Karya Mandiri dikatakan berkualitas dibanding jenis koperasi simpan pinjam yang lain karena terbukti rutin dalam melaporkan keuangan atau neraca keuangan per

tiga bulan, sedangkan KSU atau KSP lainnya tidak pernah mengirim laporan keuangan. Hal ini mengantarkan koperasi Wanita Karya Mandiri mendapatkan predikat sebagai koperasi terbaik ditahun 2017 berdasarkan pada indikator-indikator penilaian yaitu meliputi kelembagaan, usaha serta kepatuhan terhadap perundang-undangan koperasi.

Indikator kelembagaan terdiri dari administrasi dan kepengurusan (*Standard Operating Procedure* dan *Standard Operating Management*). Indikator usaha meliputi omset, aset, Sisa Hasil Usaha dan modal (modal sendiri, modal luar dan modal penyertaan). Indikator yang terakhir adalah kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan koperasi yang ada. Penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian koperasi berkualitas yang berdasarkan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah No. 06/Per/M.KUMKM/III/2008 berjumlah enam poin utama khususnya pada aspek badan usaha aktif serta aspek kinerja usaha yang semakin sehat dengan ditunjukkan melalui mekanisme manajemen koperasi yang berjalan dengan baik meliputi : Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses Perencanaan dan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian melalui struktur permodalan koperasi, kemampuan penyediaan dana, peningkatan aset dan volume hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh.

Struktur Organisasi Koperasi Wanita Karya Mandiri dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Wanita Karya Mandiri



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung.

Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung memiliki tiga strategi dasar yaitu pembinaan, penyuluhan serta pendampingan. Program pembinaan dilaksanakan dengan cara melakukan pelatihan terhadap pengurus dan pengawas koperasi serta pelatihan strategi untuk meningkatkan produktifitas koperasi dengan cara mendapatkan anggota baru. Program penyuluhan dilakukan dengan memberikan pelayanan secara langsung di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung, agar terbentuk koperasi dan wirausaha baru berdasarkan aspek koperasi yang berkualitas sesuai standar penilaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti lengkapnya laporan *Standard Operating Procedure* (SOP) dari mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), audit, proses

perencanaan, kepatuhan terhadap undang-undang koperasi dan kinerja usaha yang semakin sehat dengan bertambahnya laba bagi hasil dan jumlah anggota. Selanjutnya program pendampingan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan langsung pada koperasi yang terkait, agar pengurus koperasi mampu menyusun laporan yang berbasis SAK-ETAP dan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada program Klinik dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak seperti berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik pengembangan koperasi berkualitas.
- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak tertentu guna menjadikan skripsi ini menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap obyek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada para pengelola lembaga yang melaksanakan pelatihan penerapan program Klinik untuk menjadikan koperasi berkualitas yang sesuai dengan standar Provinsi Jawa Timur.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung tentang pelatihan penerapan strategi program Klinik dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sistem kerja yang ada untuk mencapai koperasi yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui perbedaan dan kontribusi penelitian terdahulu bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Penelitian *Pertama*, yang dilakukan oleh Abdul Hakim Pranata Putra Tahun 2010 dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif di Jawa Tengah, dengan menggunakan teori manajemen strategi. Adapun tempat penelitian dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan penelitian difokuskan pada pemberian strategi terhadap koperasi yang tidak aktif. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya untuk mendukung strategi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah membuat kebijakan-kebijakan pendukung guna mewujudkan pelaksanaan strategi pengembangan koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan tersebut meliputi : 1) Mewujudkan koperasi yang sehat dan berkualitas, 2) Mewujudkan sumber daya manusia pengelola koperasi yang kompeten dan 3) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap serta berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan koperasi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian

sebelumnya adalah 1) Pada penelitian terdahulu, strategi yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu untuk mendapatkan strategi yang tepat guna mencapai tujuan agar koperasi menjadi aktif sedangkan 2) Pada penelitian yang akan dilakukan, strategi sengaja untuk dicari dan digunakan untuk mewujudkan Koperasi Wanita yang berkualitas.

Selanjutnya penelitian *kedua*, yang dilakukan oleh Anastasia Tamara Tahun (2013) dengan judul penelitian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Manado (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) dengan menggunakan kajian teori berupa teori pemberdayaan. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Manado dengan difokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan kordinasi serta pengendalian.

Kegiatan atau upaya tersebut meliputi pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan informasi usaha, kemitraan, pemberian perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Manado dilakukan melalui penyederhanaan perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pembiayaan dan permodalan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado, serta pameran dan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 1) Penelitian terdahulu

memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sedangkan 2) Penelitian yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas Koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian *ketiga*, yang dilakukan oleh Sri Wahyuni R Tahun 2013 dengan judul Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus : Pemberdayaan Koperasi Pertanian) kajian teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori strategi, konsep pemberdayaan dan landasan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa data mengenai kondisi dari Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini koperasi pertanian, 2/3 (dua per tiga) dari jumlah koperasi pertanian sudah tidak aktif lagi. Strategi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan belum dapat membangkitkan keterpurukan dari anggota koperasi pertanian yang ada dan membuat mereka merasa tidak mampu dalam mengatasi permasalahan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah, diperlukan tiga fase yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini adalah koperasi pertanian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya berdasarkan pada fase inisial, partisipatoris,

dan emansipatoris. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara serta observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. Lama penelitiannya sekitar satu bulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan belum optimal dalam rangka memberdayakan koperasi pertanian yang berdasarkan dari tiga fase yaitu fase inisial (Dinas Koperasi berperan penuh dalam memberdayakan koperasi), fase partisipatoris (Dinas Koperasi bekerja sama dengan anggota koperasi) dan fase emansipatoris (Dinas Koperasi hanya menjadi fasilitator dalam perkembangan koperasi pertanian). Hal ini terbukti dengan kurang berkualitasnya sumber daya yang ada dalam koperasi, rendahnya permodalan koperasi, sarana serta prasarana belum memadai dan yang terakhir adalah lemahnya dalam pengawasan koperasi. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah 1) Pada penelitian terdahulu strategi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Dan studi dilakukan pada koperasi pertanian sedangkan 2) Pada penelitian yang akan dilakukan strategi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Serta studi dilakukan pada Koperasi Wanita.

Penelitian *keempat*, yang dilakukan oleh Jumroatul Kamalin Tahun 2015 dengan judul penelitian Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan

Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang). Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja koperasi, partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha. Adapun penelitian ini berlokasi di Koperasi Setia Budi Wanita Malang. Penelitian ini difokuskan pada sistem Tanggung Renteng atau pembagian resiko sebagai upaya mewujudkan kinerja koperasi, partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Adanya keterkaitan yang seimbang antara kinerja manajerial, kinerja kelompok serta kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja koperasi, 2) Partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, organisasi dan pemanfaatan jasa usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang dapat terwujud dengan adanya penerapan sistem Tanggung Renteng atau pembagian resiko serta 3) Perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari peningkatan omset usaha koperasi, terkendalinya aset yang dimiliki koperasi, dan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 1) Pada penelitian terdahulu telah dibuat dan ditemukan strategi untuk mewujudkan komponen koperasi yang berkualitas, sedangkan 2) Pada penelitian yang akan dilakukan adalah strategi masih belum ditemukan dan masih dicari untuk mewujudkan Koperasi Wanita yang berkualitas.

Penelitian *kelima*, yang dilakukan oleh Muhlisin, Suroso Mukti Leksono, dan Devi Triady Bahrudin Tahun (2015) dengan judul penelitian Daya Dukung Lingkungan Dalam Pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (PI-UMKM) Peternakan Domba dan Kambing Di Kabupaten

Pandeglang Provinsi Banten, menggunakan kajian teori berupa teori daya dukung lingkungan serta inovasi. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada peternakan domba dan kambing di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan difokuskan pada pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PI-UMKM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkatan Daya Dukung Lingkungan PI-UMKM berada pada kategori cukup. Artinya PI-UMKM menjadi modal utama dalam pengembangan PI-UMKM peternakan domba dan kambing. Sementara aspek yang lain terus dipacu untuk dikembangkan, 2) Strategi pengembangan PI-UMKM peternakan domba dan kambing di Provinsi Banten adalah melalui upaya peningkatan variabel-variabel Daya Dukung Lingkungan PI-UMKM yang masih kurang atau belum terpenuhi melalui usaha sinergi Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Perguruan Tinggi. Adapun perbedaan hasil penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 1) Pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada Daya Dukung Lingkungan untuk Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil Menengah sedangkan 2) Pada penelitian yang akan dilakukan menitik beratkan pada peningkatan kualitas koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian *keenam*, yang dilakukan oleh Wahyu Sasongko Tahun (2016) dengan judul penelitian Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jombang Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Menghadapi *Asean Economic Community*

2016. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi, daya saing, dan strategi organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jombang dengan fokus penelitian pada strategi dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menghadapi *Asean Economic Community*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktifitas dari Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jombang dilihat berdasarkan penggunaan teknologi dan sumber daya manusianya. Teknologi yang digunakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Jombang bervariasi namun kebanyakan teknologi yang digunakan masih mengandalkan alat-alat sederhana yang tergolong tradisional. Sumber daya manusia masih tergolong rendah, namun tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada, terbukti bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jombang mampu belajar secara otodidak tanpa sekolah formal maupun dengan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Selanjutnya perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah 1) Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi *Asean Economic Community* sedangkan 2) Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian *ketujuh*, yang dilakukan oleh Fitri Nuraini, Rieska Maharani dan Andrianto Tahun (2016) dengan judul penelitian Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (*Asean Economic Community*) : Suatu Telaah Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kajian teori berupa teori manajemen strategi serta daya saing. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di Kota Surabaya dengan difokuskan pada strategi peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam menghadapi *Asean Economic Community*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Peran Usaha Mikro Kecil Menengah sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara serta 2) Strategi yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas *Asean Economic Community* antara lain dengan melakukan kemitraan dalam hal permodalan, teknologi digital dan pelatihan serta pembinaan baik tenaga kerja maupun pelaku bisnis. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 1) Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui strategi Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan daya saing guna menghadapi *Asean Economic Community* sedangkan 2) Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan kualitas Koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian *kedelapan*, yang dilakukan oleh Ratnasari, D.D. Saleh, C. & Rozikin, M. (2016) dengan judul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). Penelitian ini mengkaji konsep terkait Peran, Optimalisasi dan *Capacity Building*. Penelitian dilakukan di Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep tahun 2011 yang anggotanya mencapai 1.158 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada upaya melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*) meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha. Dampak optimalisasi peran yaitu jumlah dan aktivitas anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini masih perlu ditekankan pada pengembangan anggota melalui diklat/studi banding dan lingkungan yaitu usaha toko selain anggota juga untuk umum.

Penelitian *kesembilan*, yang dilakukan oleh PURWITASARI, P. (2016) dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Oleh Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji konsep Pemberdayaan, UKM, Klinik Koperasi dan UMKM, kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM

Jawa Timur cocok dianalisis menggunakan teori Suharto: Pemungkinan yang memuat layanan akses pembiayaan, layanan konsultasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan akses pemasaran, *mobile* klinik, dan TV UKM *online*; penguatan yang memuat layanan *shortcourse*, layanan informasi bisnis dan layanan pusat pustaka entrepreneur; perlindungan yang memuat layanan konsultasi bisnis dan layanan advokasi; penyokongan yang memuat layanan konsultasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan *shortcourse* dan layanan IT entrepreneur; pemeliharaan memuat layanan advokasi dan layanan konsultasi bisnis. Masing-masing pendekatan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur sudah dapat dikatakan cukup baik.

Penelitian *kese puluh*, yang dilakukan oleh Kirana, A. A. & Saskara, I. A., (2017) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Wanita Di Kecamatan Gianyar. Penelitian ini mengkaji konsep jumlah anggota, modal, kualitas SDM, partisipasi anggota, keberhasilan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah anggota, modal, dan kualitas SDM terhadap keberhasilan koperasi melalui partisipasi anggota, perbedaan tingkat keberhasilan Koperasi Wanita mandiri dan tidak mandiri, serta bagaimana kondisi keberhasilan Koperasi Wanita di Kecamatan Gianyar. Berdasarkan hasil analisis, jumlah anggota, modal, dan kualitas SDM secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap partisipasi anggota. Jumlah anggota berpengaruh langsung terhadap keberhasilan koperasi, sementara modal dan kualitas SDM tidak memiliki pengaruh terhadap

keberhasilan koperasi. Partisipasi anggota merupakan full mediation pengaruh tidak langsung jumlah anggota terhadap keberhasilan koperasi, sementara itu partisipasi anggota merupakan parsial mediasi pengaruh tidak langsung modal dan kualitas SDM terhadap keberhasilan koperasi. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat keberhasilan Koperasi Wanita mandiri dan yang tidak mandiri.



Table 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN TAHUN	JUDUL	TEORI	FOKUS PENELITIAN	HASIL/ISI PENELITIAN	TITIK PEMBEDA
1.	Putra, (2010).	Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif di Provinsi Jawa Tengah.	Manajemen Strategi.	Penelitian berfokus pada pemberian strategi pada koperasi yang tidak aktif.	Hasil penelitian: 1. Mewujudkan koperasi yang sehat dan berkualitas. 2. Mewujudkan sumber daya manusia pengelola koperasi yang berkompeten. 3. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu, strategi yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu untuk mendapatkan strategi yang tepat guna mencapai tujuan agar koperasi menjadi aktif. - Pada penelitian yang akan dilakukan, strategi sengaja untuk dicari dan digunakan untuk mewujudkan Koperasi Wanita yang berkualitas.
2	Tamara (2013).	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Manado (Ditinjau Berdasarkan	1. Pemberdayaan.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	Hasil penelitian menunjukkan: Kegiatan atau upaya tersebut meliputi pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan informasi usaha, kemitraan, pemberian	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).			perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Manado dilakukan dengan cara penyederhanaan perizinan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pembiayaan dan permodalan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado serta pameran dan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah.	- Penelitian yang akan dilakukan meningkatkan kualitas koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
3	Wahyuni, 2013.	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1. Manajemen Strategi. 2. Pemberdayaan. 3. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah.	Strategi pemberdayaan akan ditentukan dengan pendekatan sasaran atau tujuan dan berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh Pranaka dan Priyono.	Indikator yang menjadi tolak ukur optimal atau tidaknya strategi, yaitu: 1. Fase Inisial. 2. Fase Partisipatoris. 3. Fase Emansipatoris.	- Pada penelitian terdahulu strategi dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Serta studi dilakukan pada Koperasi Pertanian. - Pada penelitian yang akan dilakukan

		Kabupaten Sidrap.				strategi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Serta studi dilakukan pada Koperasi Wanita.
4	Kamalin, 2015.	Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja koperasi. 2. Partisipasi aktif anggota. 3. Perkembangan usaha. 	Sistem Tanggung Renteng atau pembagian resiko Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterkaitan yang seimbang antara kinerja manjerial, kinerja kelompok dan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja koperasi. 2. Partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, organisasi dan pemanfaatan jasa usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang dapat terwujud dengan adanya penerapan sistem Tanggung Renteng atau pembagian resiko. 3. Perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari peningkatan omset usaha koperasi, terkendalanya aset yang dimiliki koperasi, dan peningkatan Sisa Hasil Usaha koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu, telah dibuat dan ditemukan strategi untuk mewujudkan komponen koperasi yang berkualitas. - Pada penelitian yang akan dilakukan, strategi masih belum ditemukan dan masih dicari untuk mewujudkan Koperasi Wanita yang berkualitas.

5	Muhlisin, Leksono, dan Bahrudin (2015).	Daya Dukung Lingkungan Dalam Pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PI-UMKM) Peternakan Domba dan Kambing Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Dukung Lingkungan. 2. Inovasi. 	Pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatan Daya Dukung Lingkungan PI-UMKM berada pada kategori cukup. - Strategi pengembangan PI-UMKM peternakan domba dan kambing di Provinsi Banten adalah melalui upaya peningkatan variabel-variabel Daya Dukung Lingkungan PI-UMKM yang masih kurang atau belum terpenuhi melalui usaha sinergi Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Perguruan Tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada Daya Dukung Lingkungan untuk Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil Menengah. - Pada penelitian yang akan dilakukan menitik beratkan pada peningkatan kualitas koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
6	Sasongko (2016).	Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen strategi. 2. Daya saing. 	Strategi dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro	Teknologi yang digunakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Jombang bervariasi namun	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi meningkatkan daya

		Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Menghadapi <i>Asean Economic Community</i> 2016.	3. Strategi organisasi i.	Kecil Menengah untuk Menghadapi <i>Asean Economic Community</i> 2016.	kebanyakan teknologi yang digunakan masih mengandalkan alat-alat sederhana yang tergolong tradisional. Sumber daya manusia masih tergolong rendah, namun tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada terbukti bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jombang mampu belajar secara otodidak tanpa sekolah formal maupun dengan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.	saing Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi <i>Asean Economic Community</i> . - Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
7	Nuraini, Maharani dan Andrianto (2016).	Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (<i>Asean</i>	1. Daya saing. 2. Manajemen strategi.	Strategi peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam Menghadapi <i>Asean Economic Community</i> .	a. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara. b. Strategi yang dilakukan	- Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui strategi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan daya saing guna menghadapi <i>Asean Economic Community</i>

		<i>Economic Community</i>) : Suatu Telaah Kepustakaan.			oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas <i>Asean Economic Community</i> antara lain dengan melakukan kemitraan dalam hal permodalan, teknologi digital dan pelatihan serta pembinaan, baik tenaga kerja maupun pelaku bisnis.	- Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
8	Ratnasari, D.D. Saleh, C. & Rozikin, M. (2016)	Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep).	Peran, Optimalisasi dan <i>Capacity Building</i>	mendekripsikan dan menganalisis upaya dan dampak optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada upaya melalui pengembangan kapasitas (capacity building) meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha. Dampak optimalisasi peran yaitu jumlah dan aktivitas anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan	- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran koperasi wanita dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. - Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui strategi untuk mewujudkan koperasi wanita yang berkualitas melalui program klinik.

					lingkungan sekitar.	
9	Purwitasari, P. (2016)	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Oleh Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.	Pemberdayaan, UKM, Klinik Koperasi dan UMKM	bertujuan mendeskripsikan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.	Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur cocok dianalisis menggunakan teori Suharto: Pemungkinan yang memuat layanan akses pembiayaan, layanan konsultasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan akses pemasaran, mobile klinik, dan TV UKM online; penguatan yang memuat layanan shortcourse, layanan informasi bisnis dan layanan pusat pustaka entrepreneur; perlindungan yang memuat layanan konsultasi bisnis dan layanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui klinik koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMK - Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui strategi untuk mewujudkan koperasi wanita yang berkualitas melalui program klinik.
10	Kirana, A.	Faktor-Faktor	jumlah	menganalisis	Berdasarkan hasil analisis,	- Penelitian ini

	A. & Saskara, I. A., (2017)	Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Wanita Di Kecamatan Gianyar.	anggota, modal, kualitas SDM, partisipasi anggota, keberhasilan koperasi	pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah anggota, modal, dan kualitas SDM terhadap keberhasilan koperasi melalui partisipasi anggota, perbedaan tingkat keberhasilan Koperasi Wanita mandiri dan tidak mandiri, serta bagaimana kondisi keberhasilan Koperasi Wanita	jumlah anggota, modal, dan kualitas SDM secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap partisipasi anggota. Jumlah anggota berpengaruh langsung terhadap keberhasilan koperasi, sementara modal dan kualitas SDM tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan koperasi.	dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berperan dalam keberhasilan koperasi wanita - Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui strategi untuk mewujudkan koperasi wanita yang berkualitas melalui program klinik.
--	-----------------------------	--	--	---	---	---

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang penghasilannya tergolong rendah untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan dengan baik. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangannya masing-masing. Dana yang dimaksud yaitu berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, hal tersebutlah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difokuskan agar pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat dapat sesuai dan juga memiliki daya untuk mengembangkan perekonomian berdasarkan *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Hutama menjelaskan bahwa *good governance* adalah tatanan pemerintahan yang baik yaitu merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, keseimbangan peran, serta saling adanya pengontrolan yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.¹ Dalam kondisi ini harus memperhatikan tiga pilar yang diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah,

¹ Agus, Dwiyanto. 2006. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: UGM Press, hal.57

masyarakat dan swasta yang akan menjalin hubungan kemitraan agar dapat berjalan dengan selaras.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu yang mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan pengendalian diri terhadap apa yang akan dikerjakan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik dan untuk mencapai kemandirian masyarakat tersebut diperlukan sebuah proses yang harus dilewati. Upaya yang dilakukan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan dengan baik yaitu dengan cara mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausahawan yang tergolong berhasil, dengan memberikan pelatihan karena akan menjadi bekal yang penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan dan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya² :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan melalui seminar dan lokakarya kepada masyarakat. Upaya pengembangan lainnya yaitu dengan pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan sesuai dengan berbagai bentuk permasalahan yang akan dihadapi. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan secara menyeluruh sehingga mampu menumbuhkan

² Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora, hal 31-35

motivasi terhadap masyarakat yang diharapkan dapat memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek berwirausaha secara langsung, baik oleh masyarakat yang memang terlibat dengan kewirausahaan atau melalui pemberian contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usahanya. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus dijalankan, sehingga mampu menghindari sekecil mungkin kegagalan yang akan dialami dalam pengembangan kegiatan wirausaha masyarakat.

b. Pemberian Modal Usaha (Permodalan)

Permodalan dalam bentuk bantuan pendanaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia usaha, tetapi bukan tergolong utama untuk mendapatkan dukungan keuangan dari perbankan dan dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan digunakan sebagai modal awal, melainkan untuk modal pengembangan setelah usaha yang dirintis dapat menunjukkan prospek yang tergolong cukup baik. Karena jika usaha tersebut belum menunjukkan perkembangan keuntungan yang dikategorikan baik maka pihak bank tidak akan bersedia memberikan pinjaman. Bentuk pemberdayaan yang kedua yaitu melalui pendidikan, karena merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka yang panjang.

Kemiskinan yang terjadi kebanyakan bersifat turun-menurun sehingga orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dan hal tersebut pasti akan menambah jumlah angka kemiskinan. Bentuk pemberdayaan pada sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara. Pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis dapat mengurangi beban orang tua sekaligus meningkatkan keinginan anak untuk belajar. Cara yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan tempat belajar formal atau pun non formal serta penyaluran dana pendidikan selain untuk beasiswa juga sebagai pembenahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, karena untuk menciptakan pelajar yang berkualitas perlu disesuaikan dengan sarana prasarana yang harus memadai.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dapat diartikan sebagai : semua bentuk fasilitas yang dapat memberikan manfaat untuk proses kegiatan perekonomian masyarakat. Sarana terbagi menjadi tiga, dimana semuanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan antara lain :

- a. Sarana pokok yaitu merupakan sarana utama yang menunjang proses kegiatan usaha seperti : listrik, air, jalan dan mesin-mesin produksi.
- b. Sarana perlengkapan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsinya membuat konsumen lebih lama tinggal di daerah atau tempat yang terkait seperti tersedianya alat-alat sebagai penunjang produksi.

- c. Sarana penunjang adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana prasarana pokok, sarana penunjang bertujuan agar masyarakat dapat menambah nilai dari produk yang dihasilkan seperti alat transportasi dan lain-lain.

Prasarana menurut Yoeti adalah fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. ³Menurut Lothar A. Kreek yang dikutip Yoeti membagi prasarana perekonomian menjadi empat kelompok yaitu meliputi : ⁴

- 1) Pengangkutan (transportasi) yang dapat membawa para konsumen dari tempat tinggal asal ke tempat yang merupakan daerah tujuannya.
- 2) Prasarana komunikasi yang bermanfaat agar mampu mendorong keinginan para konsumen untuk mengadakan perjalanan-perjalanan jarak jauh. Dengan tersedianya prasarana komunikasi konsumen dapat berkomunikasi dengan pihak yang hendak dituju pada tempat asalnya, yang termasuk dalam prasarana ini antara lain : telepon, radio, TV, dan lain-lain.
- 3) Perbankan, pelayanan bank yang lancar dan baik berarti konsumen mendapatkan jaminan untuk kemudahan dalam mengirim dan menerima uang.

³ Yoeti. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung :Angkasa, hal 344

⁴ Erawan, I Nyoman. 1994. Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi. Denpasar: PT. Upada Sastra, hal 364

- 4) Kelompok prasarana yang tergolong utilitas maksudnya adalah kelompok prasarana bersifat mendasar, yang termasuk dalam kelompok ini yaitu meliputi : penerangan listrik dan persediaan air bersih.

d. Penyedia Informasi Tepat Guna

Salah satu elemen yang menjadi kekuatan penting pada strategi pemberdayaan masyarakat adalah informasi. Ketersediaan informasi merupakan kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan serta kebijakan yang ditemukan diantara individu atau dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi yang lebih efektif, tidak hanya sekedar volume dan besaran saja. Dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat dituntut untuk selalu berinovasi bagaimana cara yang cepat dan tepat dalam menciptakan suatu sarana yang nantinya akan membantu proses kinerja terhadap masyarakat. Salah satu contoh di antaranya adalah teknologi komputer yang sampai sekarang terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk selalu mengetahui tentang teknologi pada era globalisasi yang maju seperti saat ini.

e. Pengelolaan Kelembagaan

Pengelolaan kelembagaan dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pembentukan kelompok usaha ekonomi mikro dan usaha kecil masyarakat. Modal usaha dalam pengembangan kegiatan usaha perekonomian mikro dan usaha kecil masyarakat harus diidentifikasi melalui pengembangan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi

sumberdaya lokalnya. Identifikasi juga dilakukan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan keterkaitannya dengan usaha perekonomian di perkotaan. Perkembangan keterampilan pengelola kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat merupakan contoh peningkatan dan pemberdayaan serta pengembangan ekonomi di pedesaan.

Selain itu pemerintah juga menghubungkan masyarakat dengan jaringan kemitraan antara lembaga keuangan mikro dengan kalangan perbankan. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro merupakan contoh program yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

2.2.2 Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Cooperation*, terdiri dari kata *Co* yang artinya bersama dan *Operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *Cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah organisasi atau badan usaha yang dikelola secara demokratis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan masyarakat yang kondisi perekonomiannya tergolong lemah guna membela keperluan hidupnya dan untuk mencapai keperluan hidupnya tersebut menggunakan ongkos yang semurah-murahnya itulah yang hendak dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan mengutamakan keuntungan⁵. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas kemudian tergabung melalui suatu bentuk organisasi atau badan usaha dan diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dan bertujuan memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk serta keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha guna mempertinggi kesejahteraan para anggota dan bagi masyarakat. Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” melalui perkumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata berfokus pada ekonomi bukan sosial seperti yang dimaksud yaitu tentang gotong royong⁶.

⁵ Revrison Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-UGM. hal. 57

⁶ Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga. hal.

Definisi Koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi⁷ adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada azas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu :

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan pada azas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang perorangan atau badan usaha yang memiliki tujuan sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian masyarakat.

⁷Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 16 agustus 2017.

Sri-Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi⁸ menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu :

- 1) Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik masyarakat yang tergolong lemah perekonomiannya serta didominasi oleh sistem ekonomi penguasa. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan yang produktif.
- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung, tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya masyarakat Indonesia. Kepribadian masyarakat bergotong-royong serta kekolektivan akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina masyarakat yang golongan ekonominya kecil. Kelompok ekonomi kecil tersebut adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam perekonomian Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang bersifat sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti (PT, CV, Firma dan sebagainya) maupun bangun usaha negara (Perusahaan Negara) serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.

⁸Hendar, Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi*. Edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE –UI. hal 55

5) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan azas kekeluargaan. Secara keseluruhan koperasi adalah sebagai pusat kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian⁹ yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi, 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat dan 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

c. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992¹⁰, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 16 agustus 2017.

¹⁰Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 16 agustus 2017.

- 1) Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan pada azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan azasnya saja, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi serta usaha yang dianut. Prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari azas kekeluargaan yang dianutnya. Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi pada prinsip Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* adalah sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar.

- 2) Penjualan barang secara tunai.
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar.
- 4) Sisa Hasil Usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian masing-masing anggota kepada koperasi.
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara.
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan.

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun di dalam perkembangannya kemudian ditambahkan beberapa prinsip lain seperti :

- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela.
- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong menolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

e. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi kedalam berbagai kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristiknya. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 Undang-Undang No 25

Tahun 1992¹¹ menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis-jenis koperasi yaitu meliputi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari pendekatan yang lain, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

- 1) Berdasarkan bidang usahanya, penggolongan ini mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada konsumennya antara lain :
 - a) Koperasi Produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi barang.
 - b) Koperasi Konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
 - c) Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan.
 - d) Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

¹¹Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>), diakses pada 16 agustus 2017

- 2) Berdasarkan jenis komoditinya, penggolongan ini didasarkan pada jenis barang atau jasa yang menjadi obyek usaha koperasi yang terdiri dari :
- a) Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
 - b) Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
 - c) Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
 - d) Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
 - e) Koperasi jasa yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.
- 3) Berdasarkan jenis anggotanya, dengan dikelompokkannya koperasi secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti yang sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi koperasi (Hatta dalam Revrison Baswir, 2000: 81)¹². Berdasarkan anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut : a) Koperasi Karyawan

¹² Revrison Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-UGM. hal. 19

(Kopkar) b) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) c) Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) d) Koperasi Mahasiswa (Kopma) e) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) f) Koperasi Peranserta Wanita (Koperwan) g) Koperasi Pramuka (Kopram) h) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan sebagainya.

4) Berdasarkan daerah kerjanya, yang dimaksud adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha atau koperasi dalam melayani kepentingan anggota dan masyarakat.

Penggolongannya adalah sebagai berikut :

- a) Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b) Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.
- c) Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

f. Aspek-aspek Penilaian Koperasi Berkualitas

Dengan mencermati visi, persepsi serta pemahaman yang hendak dituju dan diwujudkan maka pengertian dari koperasi berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan dua hal sekaligus secara bersamaan yaitu sebagai badan usaha yang sukses, sehat dan maju serta juga sebagai koperasi yang sejati. Artinya koperasi tersebut dapat mewujudkan sebagai badan usaha yang mampu

menjalankan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku secara baik dan berhasil serta sekaligus berhasil mewujudkan sebagai koperasi yang benar-benar taat terhadap azas dan konsisten dengan prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian maka bila ada badan usaha (koperasi) yang dalam menjalankan sistem organisasinya benar-benar telah bertumpu serta mengacu pada azas dan prinsip-prinsip koperasi tetapi tidak dapat mengembangkan usahanya sesuai kaidah-kaidah bisnis yang ada maka meskipun badan usaha tersebut tetap disebut sebagai koperasi sejati, akan tetapi bukan merupakan kategori koperasi yang berkualitas. Demikian juga, bila ada badan usaha yang memiliki kegiatan usaha yang besar, berkembang dengan skala usaha yang luas, dikelola secara sehat dan sangat memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang ada tetapi dalam menjalankan kegiatannya mengabaikan azas, nilai-nilai, prinsip-prinsip serta hakekat berkoperasi maka badan usaha tersebut bukan termasuk dalam golongan koperasi sejati dan juga bukan merupakan koperasi yang berkualitas. Namun demikian bagi koperasi yang masih tergolong kecil apabila benar-benar dikelola secara baik sesuai azas, nilai-nilai, prinsip dan hakekat berkoperasi serta dikelola dengan sehat sesuai kaidah-kaidah bisnis yang ada dan memiliki potensi untuk maju bertumbuh serta berkembang maka badan usaha tersebut dapat masuk dalam kategori koperasi sejati sekaligus merupakan koperasi yang berkualitas.¹³

¹³ Iskandar Soesilo. 2006. Bagaimana Memaknainya Koperasi Berkualitas. Jurnal Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006

Hakekat koperasi berkualitas dapat dilihat dari kegiatan usaha yang akan ditangani koperasi dan tuntutan partisipasi usaha yang aktif dari para anggota koperasi. Bertujuan untuk menolong diri sendiri serta mempunyai suatu tujuan bersama yang hendak dicapai melalui koperasi yaitu terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menggunakan kekuatan kolektif, yang dimaksud adalah pengertian tentang kesadaran akan terbatasnya kemampuan ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki, hal tersebut menimbulkan keyakinan perlunya penyatuan kekuatan serta potensi usaha yang dimiliki para anggota koperasi dan masyarakat. Dengan demikian kepentingan dan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dipenuhi secara lebih baik dibandingkan bila hal tersebut dilakukan sendiri-sendiri. Berangkat dari kesadaran dan keyakinan tersebut, para anggota koperasi dan masyarakat bersepakat untuk bergabung dan bersama-sama membangun usaha melalui wadah suatu organisasi yaitu koperasi. Dengan demikian unsur-unsur kesamaan kepentingan atau kebutuhan ekonomi, kesadaran akan terbatasnya kemampuan ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki, keyakinan akan perlunya penyatuan kekuatan ekonomi dan potensi usaha serta kebersamaan dalam membangun usaha merupakan suatu acuan dasar bagi berdirinya sebuah koperasi. Namun masih perlu dilengkapi dengan tuntutan atau kemauan yang kuat dari setiap anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap usaha yang diputuskan dan dikembangkan secara bersama-sama dalam koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi pasal 4 ayat 1¹⁴ agar dapat menggambarkan secara utuh mengenai badan usaha koperasi maka pengembangan sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada tiga sifat koperasi yaitu : Koperasi sebagai badan usaha, Koperasi sebagai kumpulan orang dan Koperasi sebagai akselerasi pembangunan. Agar sistem pemeringkatan koperasi dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh koperasi sebagai badan usaha maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup aspek-aspek yang mewakili kecirian sebagai badan usaha dan kecirian sebagai koperasi berkualitas yaitu :

a. Aspek badan usaha aktif

Ditunjukkan antara lain dengan jalannya mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses Perencanaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan koperasi.

b. Aspek kinerja usaha yang semakin sehat

Ditunjukkan antara lain dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan aset, peningkatan volume hasil usaha atau keuntungan. Pada aspek ini juga menilai daya saing koperasi sekaligus kemampuan untuk meningkatkan posisi tawarnya.

¹⁴ Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

c. Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota

Ditunjukan antara lain dengan keterkaitan antara anggota dengan organisasinya berupa Tanggung Renteng atau pembagian resiko, peningkatan jumlah anggota, persentase kehadiran anggota dalam rapat anggota, pelunasan simpanan wajib dan penetapan besarnya simpanan sukarela serta pola pengkaderan.

d. Aspek orientasi kepada pelayanan anggota

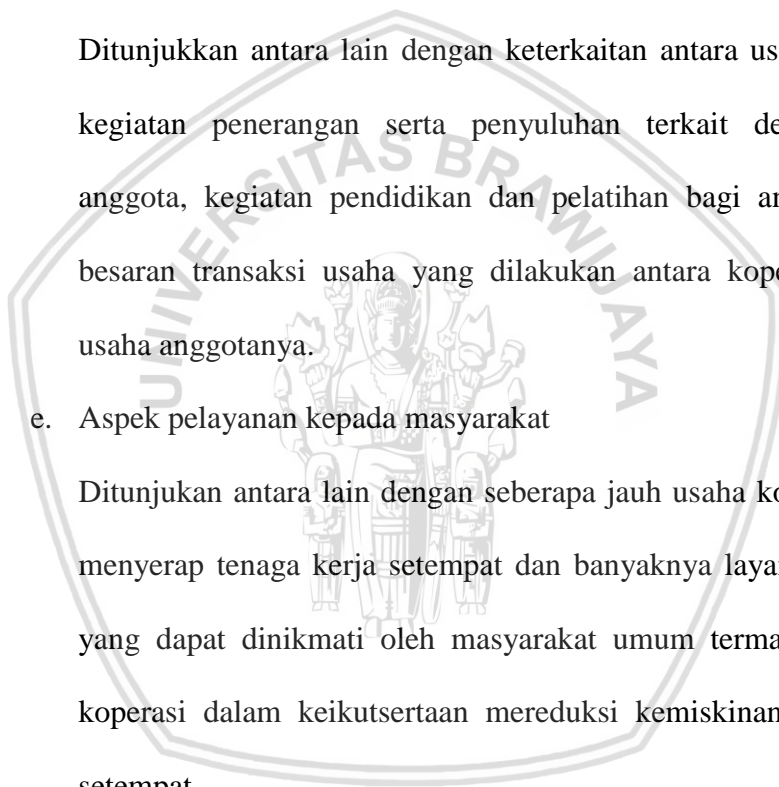
Ditunjukkan antara lain dengan keterkaitan antara usaha anggota, kegiatan penerangan serta penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.

e. Aspek pelayanan kepada masyarakat

Ditunjukan antara lain dengan seberapa jauh usaha koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat dan banyaknya layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peranan koperasi dalam keikutsertaan mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

f. Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah

Ditunjukkan antara lain dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dan berbagai dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah.



2.2.3 Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional¹⁵.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar serta memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang harus memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹⁵Iman Pirman Hidayat & Adi Ridwan Fadillah. 2009. *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Operasional*. Tesis.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Tujuan dan Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu bertujuan menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi serta perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi pada usaha mikro dibandingkan dengan yang terjadi di perusahaan besar ¹⁶. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat ¹⁷ :

¹⁶Sutrisno, Joko & Sri Lestari. 2006. *Kajian Usaha Mikro Indonesia Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I-2006*.

¹⁷Neddy, Rafinaldy. 2006. *Memeta Potensi Dan Karakteristik UMKM Bagi Pertumbuhan Usaha Baru*. Infokop Nomor 29.

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan perekonomian di berbagai sektor penyedia lapangan pekerjaan yang terbesar.
- 2) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- 4) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal serta menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif Sugiyono.¹ Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data lisan yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi yang diperoleh melalui informan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Tujuan penelitian ini adalah Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung.

¹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 66

² Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya. hal. 32

3.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung dan di Koperasi Wanita Karya Mandiri.

58

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian yang dipusatkan pada penelitian ini adalah Program Klinik Dalam Meningkatkan Kualitas Koperasi Wanita Karya Mandiri Di Desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung penelitian pada :

1. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas.
 1. Strategi Program Klinik :
 - 1) Program pembinaan kepada koperasi.
 - 2) Program penyuluhan kepada koperasi.
 - 3) Program pendampingan kepada koperasi.
 2. Penilaian Kualitas Koperasi :
 - 1) Aspek badan usaha aktif.
 - 2) Aspek kinerja usaha yang semakin sehat.
 - 3) Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota.

- 4) Aspek orientasi kepada pelayanan anggota.
- 5) Aspek pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas.

a. Faktor Internal :

- 1) Sumber Daya Manusia pegawai dinas.
- 2) Anggaran pegawai dinas.
- 3) Perencanaan program.

b. Faktor Eksternal :

- 1) Tingkat kesadaran dan partisipasi koperasi.
- 2) Dukungan pemerintah pusat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti melalui wawancara dari narasumber yakni informan yang memberikan data berupa kata-kata atau tindakan dan mengerti mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu tentang strategi program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul

penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kegiatan penguatan kapasitas pegawai dan pengurus tentang strategi penerapan program Klinik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

3.5.1 Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada latar penelitian. Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut dengan baik. Pelaksanaan observasi dapat diketahui melalui perilaku seseorang.³ Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan Program Klinik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung guna meningkatkan kualitas koperasi.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Dalam penelitian ini

³ Ibid hal: 67

peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus atau kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden atau informan.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan *perspective* responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*).⁴ Wawancara dilakukan kepada Kepala dan anggota Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung dan Ketua beserta pengurus dan anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas. Pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan pengumpulan data yang berasal dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian dengan mengambil data sekunder diantaranya data yang berbentuk

⁴ Riyanto, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketujuh*, Yogyakarta : YBPFE UGM. hal: 66

laporan kegiatan program Klinik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung dan laporan kegiatan di Koperasi Wanita Karya Mandiri.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah menggunakan cara *key person* dengan syarat informasi harus sesuai dengan fokus penelitian⁵. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan memakai pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah :

1. Informan Kunci
 - a. Kepala program Klinik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung.
 - b. Bagian penyuluhan dan pembinaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung.
2. Informan Utama
 - a. Kepala Koperasi Wanita Karya Mandiri.
 - b. Pengurus Koperasi Wanita Karya Mandiri.
3. Informan Pendukung
 - a. Koordinator Anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri.

⁵Bungin, Burhan (2003) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal.108.

Table 3.1 Nama – Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Priyoharjoko	Kepala Program Klinik
2	Budi Hananto	Bagian Penyuluhan Dan Pembinaan
3	Dadang Wahyu	Bagian Penyuluhan Dan Pembinaan
4	Fitri Asih Kurniawati	Bagian Penyuluhan Dan Pembinaan
5	Misrini	Bagian Penyuluhan Dan Pembinaan
6	Sunarti	Kepala Koperasi Wanita Karya Mandiri
7	Susiani	Bendahara Koperasi Wanita Karya Mandiri
8	Sulikah	Sekretaris Koperasi Wanita Karya Mandiri
9	Ika Verawati	Koordinator Anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri

Sumber : Koperasi Wanita Karya Mandiri, Tahun 2017

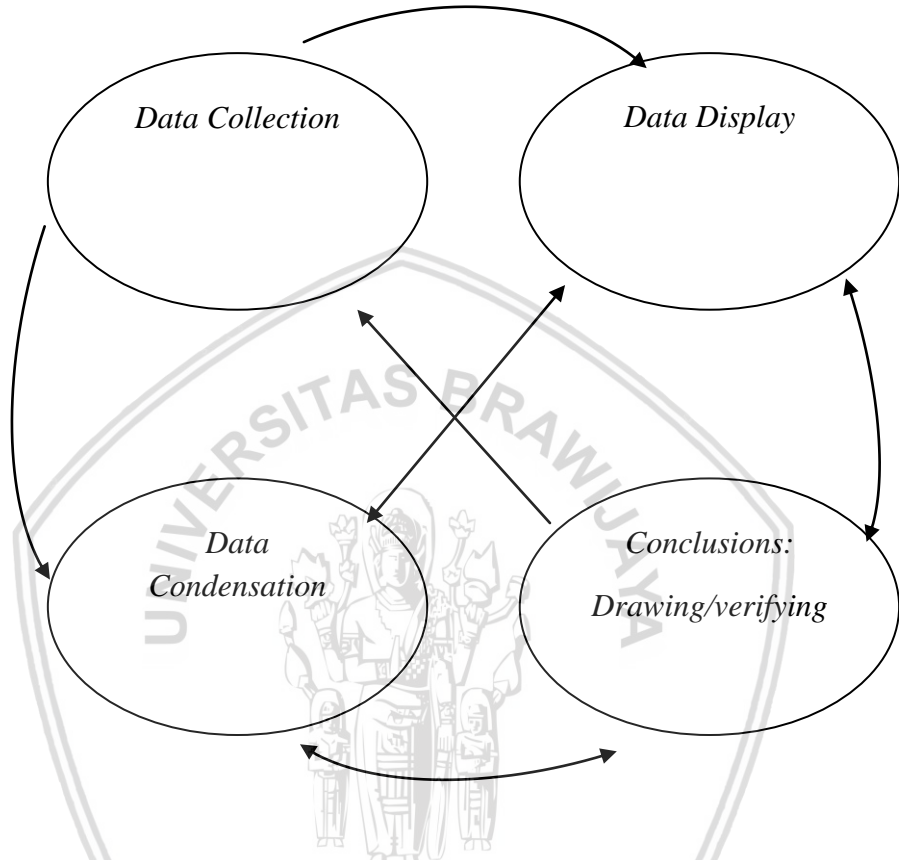
3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesainya pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman “Dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis yaitu (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) serta pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus

dan interaktif”. Berikut ini adalah gambar 3.1 mengenai komponen dalam analisis data, yaitu : ⁶

Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman ⁷



1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan

⁶ Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. hal. 75

⁷ Ibid.m hal.76

bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, serta materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang terpenting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yakni: (a) triangulasi data atau sumber (*data triangulation*), (b) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (c) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), (d) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil penelitian.⁸

⁸ Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. hal. 97

Selain triangulasi data, untuk menjamin keakurasian data penelitian maka peneliti berusaha dengan terus menerus dari mulai awal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian sampai pada akhir penelitian, sebelum ditarik suatu kesimpulan selalu melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian akan diperoleh data penelitian yang berkualitas yang dapat ditulis dalam laporan hasil penelitian yang juga berkualitas.



BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Deskripsi Wilayah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kabupaten Tulungagung berlokasi di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 32, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Dinas KUMKM ini bersebelahan dengan SMA Negeri 1 Kedungwaru, dan dekat dengan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Di bagian depan sebelah timur dari Dinas KUMKM ini sekaligus merupakan tempat Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung.

4.2. Gambaran Umum Koperasi

1. Visi Koperasi

Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh dan mandiri serta berdaya saing tinggi sehingga dapat berperan serta sebagai pelaku utama dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat.

2. Misi Koperasi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung, maka perlu ditetapkan Misi sebagai acuan dan arah pelaksanaan program kegiatan selama lima tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Menjadi sentral ekonomi anggota.
- b. Menjadi wadah ekonomi yang sehat dan menguntungkan.
- c. Menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari, baik berbentuk barang maupun jasa.
- d. Menjadi media perdagangan dan jasa anggotanya.
- e. Menjadi tempat diskusi dan konsultasi dalam bidang ekonomi.

4.3. Gambaran Umum Program Klinik

1. Visi

Penyediaan beragam jasa layanan yang berkualitas tinggi guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan mayoritas KUMKM dengan biaya yang ringan dan wajar untuk meningkatkan daya saing dan daya jual produk KUMKM dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Misi

- a. Mempersiapkan dan mendorong percepatan terwujudnya KUMKM yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi pasar global dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Timur melalui

layanan konsultasi, informasi, dan advokasi bisnis yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Mikro kecil dan Menengah.

- b. Membantu dan mendorong KUMKM agar mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui intervensi dan bantuan yang tepat dan relevan.
- c. Penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru.
- d. Terciptanya jaringan usaha di tingkat nasional dan regional.
- e. Terwujudnya Klinik KUMKM yang mandiri dan profesional sampai tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan daerah dan daya saing daerah Provinsi Jawa Timur.

4.3.1. Layanan Klinik KUMKM

- a. Layanan Pokok Klinik KUMKM Provinsi Jawa Timur terdiri dari :
 - 1) Layanan konsultasi bisnis merupakan layanan konsultasi secara personal antara pendamping dengan pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Pendamping akan membimbing untuk menemukan masalah dan mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang ada.
 - 2) Layanan informasi bisnis diberikan untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan bagi Koperasi dan UMKM seperti database bahan baku, produk perbankan, peluang ekspor, kemitraan, pemasaran, program pemerintah dan lain-lain.

- 3) Layanan advokasi dan pendampingan adalah layanan yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang belum mampu melakukan sendiri aktivitasnya misalnya pembuatan laporan keuangan, pengurusan ijin usaha, pembuatan proposal kredit, dan lainnya.
- 4) Layanan pelatihan singkat atau (*short course*) diberikan kepada masyarakat serta para pelaku usaha agar mereka mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang baik di dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelatihan diberikan baik yang bersifat *by managerial* maupun yang bersifat *by product* dan IT.
- 5) Layanan akses pembiayaan merupakan pemberian layanan bidang permodalan serta memberikan informasi kredit, selanjutnya Koperasi dan UMKM diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, mendampingi pengajuan, presentasi, dan negosiasi kredit.
- 6) Layanan akses pemasaran merupakan sebuah layanan yang disediakan untuk membantu Koperasi dan UMKM di bidang pemasaran melalui berbagai kegiatan seperti kontak bisnis, promosi produk, dan kegiatan pameran.
- 7) Layanan pusat pustaka enterpreneur merupakan suatu layanan yang memberikan kesempatan bagi Koperasi dan UMKM serta pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan pengembangan

kewirausahaan praktis, layanan ini membantu wirausaha memiliki wawasan yang luas.

- 8) Layanan mobil Klinik KUMKM keliling ditujukan bagi para Koperasi dan UMKM serta pelaku usaha yang tidak memiliki kesempatan datang ke Klinik KUMKM. Secara periodik mobil KUMKM keliling dilengkapi dengan peralatan dan dipandu konsultasi untuk mengunjungi sentra-sentra usaha baik di pasar-pasar tradisional maupun modern.
- 9) Layanan IT entrepreneur merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat serta pelaku Koperasi dan UMKM agar memiliki kemampuan di bidang IT, dan membantu menjadi pelaku usaha yang berbasis teknologi sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
- 10) Layanan TV UKM Jatim Online merupakan layanan promosi melalui televisi dengan media internet. Terdapat tiga menu utama yaitu *news*, *video* dan *live streaming*. Diharapkan promosi melalui media ini akan mampu memperkenalkan dan mengembangkan produk-produk KUMKM unggulan di Provinsi Jawa Timur.

b. Layanan Pendukung/Penunjang Klinik KUMKM

- 1) Pelatihan Berbasis Peningkatan Kinerja
 - a) Pelatihan pengembangan manajemen kewirausahaan modul GIYB (*General Idea Your Business*) ILO (*International Labour Organization*), yaitu pelatihan pengembangan dan pemilihan

ide bisnis bagi mereka yang belum bekerja, korban pemutusan hubungan kerja, dan bagi pegawai atau karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

- b) Pelatihan pengembangan manajemen kewirausahaan modul SIYB (*Start Improve Your Business*) ILO (*International Labour Organization*), yaitu pelatihan memulai dan mengembangkan bisnis bagi mereka yang ingin memulai usaha serta mengembangkan usaha yang ada atau ekspansi usaha.
 - c) Pelatihan konsultan pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang meliputi hak cipta, paten dan merk.
 - d) Pelatihan sistem pembiayaan syariah dan sistem kelompok serta tanggung renteng bagi koperasi.
 - e) Pelatihan dasar-dasar konsultan KUMKM.
 - f) Pelatihan keuangan praktisi bagi KUMKM.
 - g) Pelatihan pengembangan servis bisnis KUMKM.
 - h) Pelatihan *Rural Rapid Appraisal* (RRA) bagi Koperasi dan UMKM.
 - i) Pelatihan penyusunan rencana bisnis bagi Koperasi dan UMKM.
 - j) Pelatihan sistem IT bagi UMKM dan Koperasi syariah.
 - k) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro.
- 2) Seminar.
 - 3) Pameran.
 - 4) Layanan Klinik KUMKM keliling.

- 5) Kemitraan/kerjasama.
- 6) *Trading house* (fasilitas pemasaran).

4.4. Tujuan Terbentuknya Program Klinik

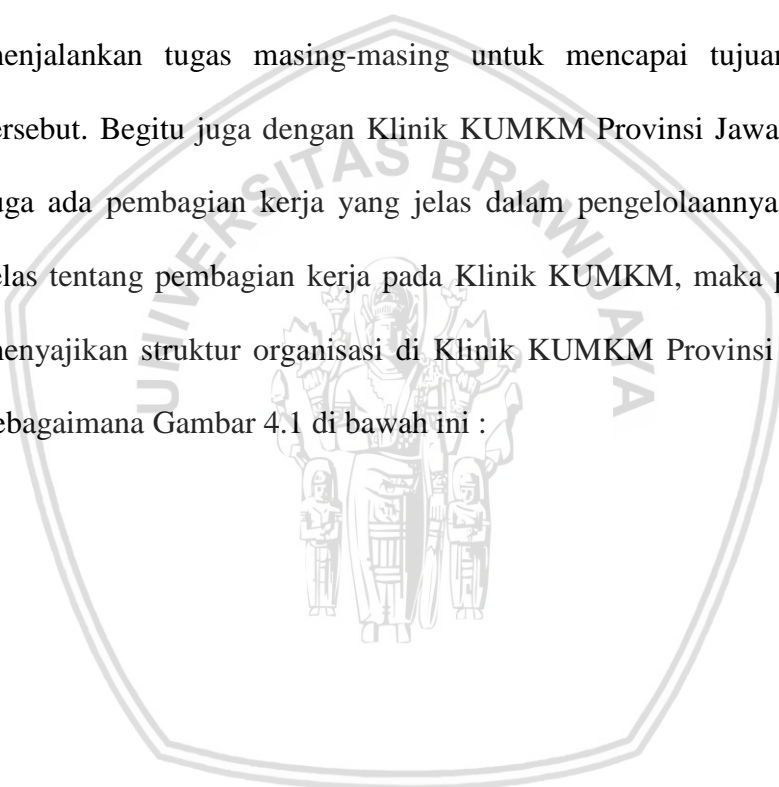
Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebuah lembaga pendukung yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Program Klinik merupakan program penyediaan layanan pengembangan usaha terpadu dan komprehensif secara gratis, personal serta profesional kepada masyarakat dan bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan lembaga milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Lembaga tersebut mempunyai tugas pokok untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pada pelaksanaannya lembaga ini menyediakan berbagai pelayanan publik yang berhubungan dengan dunia bisnis seperti informasi bisnis, pelayanan konsultasi bisnis, advokasi beserta pendampingan, pelatihan singkat, akses pembiayaan, akses pemasaran, pustaka entrepreneur, mobil Klinik KUMKM keliling, layanan IT enterpreneur dan layanan TV KUMKM Jatim Online. Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pusat informasi serta layanan pelatihan dan konseling yang handal untuk memuaskan pelanggan agar mampu membantu dalam peningkatan

kualitas koperasi. Sehingga, dalam membantu pengembangan kinerja usaha pada sektor koperasi, maka dibentuk program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Fungsi dari program Klinik yaitu membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi serta bertujuan meningkatkan kualitas koperasi yang berada di Kabupaten Tulungagung.

4.5 Struktur Organisasi Klinik KUMKM

Dalam suatu organisasi pasti ada pembagian kerja yang jelas dalam menjalankan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Begitu juga dengan Klinik KUMKM Provinsi Jawa Timur pasti juga ada pembagian kerja yang jelas dalam pengelolaannya. Agar lebih jelas tentang pembagian kerja pada Klinik KUMKM, maka peneliti akan menyajikan struktur organisasi di Klinik KUMKM Provinsi Jawa Timur sebagaimana Gambar 4.1 di bawah ini :



BAB V

STRATEGI MEWUJUDKAN KOPERASI WANITA BERKUALITAS MELALUI PROGRAM KLINIK

5.1 Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung Melalui Program Klinik dalam Mewujudkan Koperasi Yang Berkualitas

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang ada di Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten untuk dikembangkan dalam rangka perwujudan iklim usaha yang lebih produktif. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dapat menunjang meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah. Strategi yang disusun oleh Dinas KUMKM dalam rangka pembinaan bagi pelaku KUMKM menjadi faktor penting dalam mengembangkan usahanya. Strategi yang disusun berupa Program Klinik yang meliputi pemberian layanan konsultasi, informasi, bantuan advokasi bisnis dan layanan pelatihan singkat (*short course*) dengan memobilisasi pendamping KUMKM yang berkualitas.

Pendamping KUMKM adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa penasehat ahli tertentu dan menjalin relasi dengan masyarakat serta KUMKM. Pendampingan dilakukan dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan beserta permasalahan yang dihadapi KUMKM. Mobilisasi pendamping disini mempunyai maksud melakukan kerja sama dengan para pendamping yang ada di Kabupaten di seluruh Jawa Timur untuk mengelola Klinik. Para pendamping dari setiap Kabupaten inilah yang setiap hari

secara bergantian melaksanakan piket untuk menjalankan Klinik KUMKM di Provinsi Jawa Timur. Program Klinik KUMKM Provinsi Jawa Timur mulai diterapkan di KUMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung seperti Koperasi Wanita Karya Mandiri yang berlokasi di Desa Plosokandang. Tujuan program tersebut ialah meningkatkan keahlian masyarakat dalam berwirausaha serta kemampuan menciptakan produk agar mampu bersaing dengan KUMKM di daerah lain.

Program Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur didirikan pada tahun 2008 dengan menyediakan 4 (empat) jenis layanan. Hampir setiap tahun jenis layanan yang ada Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan. Hingga saat ini jumlah layanan telah mencapai 13 (tiga belas) jenis layanan. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir berbagai permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Pemberian layanan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya dalam menumbuhkan wirausaha baru. Khusus untuk Kabupaten Tulungagung penyelenggaraan program Klinik koperasi dan UMKM beroperasi pada tahun 2009 tepatnya bulan September. Klinik Koperasi dan UMKM ini memiliki tujuan untuk memberikan inovasi dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang relatif mudah serta sudah direplika 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2009. Diharapkan dengan adanya program Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur maka dapat dijadikan sebagai model solusi nasional pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan

terbukti Kementerian Koperasi dan UKM RI mereplika Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan di bangun di seluruh Indonesia.

5.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

5.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan melalui seminar dan loka karya dengan materi tertentu kepada masyarakat. Upaya pengembangan lainnya yaitu pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat serta diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.¹

Guna menunjang terlaksananya program dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, tentunya dibutuhkan SDM yang mempunyai keterampilan mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Salah satu faktor yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui keterampilan SDM diantaranya dapat diketahui melalui latar belakang pendidikan yang dimiliki. Adapun latar belakang pendidikan

¹ Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora, hal 31-35

pengurus koperasi sebagaimana data yang didapatkan peneliti selama melakukan pengambilan data adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Latar Belakang Pendidikan Pengurus Koperasi Wanita Karya Mandiri

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sunarti	Ketua	SMA
2	Sulikah	Sekretaris	SMA
3	Susiani	Bendahara	SD
4	Ika Verawati	Koordinator Anggota	D1

Sumber : Koperasi Wanita Karya Mandiri, Tahun 2017

1. Dalam hal ini untuk menunjang peningkatan kualitas KUMKM maka Klinik menerapkan 3 strategi program yaitu meliputi :
 - a. Program Pembinaan Kepada Koperasi

Gambar 5.1

Pembinaan di Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung



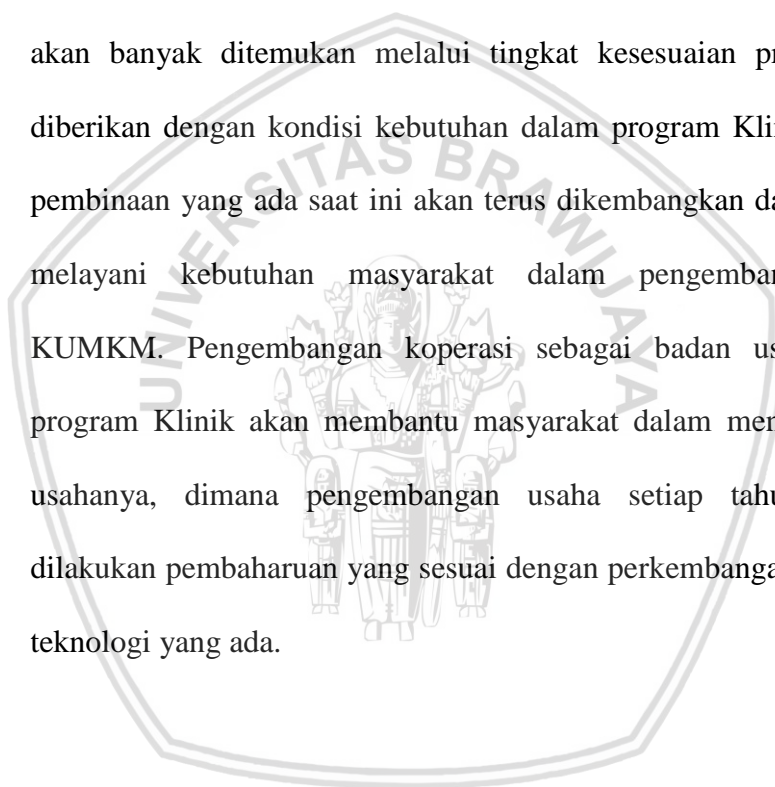
Sumber : Dokumentasi Peneliti 03 April 2018

Keberhasilan Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan melalui program Klinik adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha dan jumlah anggota agar terwujud pengembangan usaha dan kemandirian dalam berwirausaha. Pertemuan yang dilakukan secara berkala dengan pihak Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk membahas berbagai persoalan yang muncul untuk kemudian diselesaikan secara bersama. Dengan adanya pertemuan secara berkala tersebut diharapkan KUMKM seperti pada Koperasi Wanita Karya Mandiri mendapatkan masukan secara spesifik mengenai suatu persoalan yang dialami kemudian diberikan arahan dan petunjuk secara tepat mengenai program Klinik dalam mengembangkan KUMKM.

Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya program pembinaan masyarakat dapat memahami dengan mudah mengenai program Klinik yang akan diterapkan untuk pengembangan seperti pada Koperasi Wanita Karya Mandiri. Hal tersebut ditunjang melalui pertemuan secara berkala dan konsultasi mengenai KUMKM. Hasil program pembinaan yang diterapkan oleh Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung berjalan dengan baik, terlihat dari tingginya apresiasi masyarakat yang berpartisipasi. Sehingga program pembinaan Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usahanya. Program pembinaan yang diberikan oleh

Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung yaitu melalui pemberian konsultasi mengenai usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan, sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik.

Setiap usaha tentu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung kondisi lingkungan usaha yang akan dijalankan. Perbedaan karakteristik tersebut memunculkan pola kebutuhan usaha yang berbeda pula. Keberhasilan program pembinaan akan banyak ditemukan melalui tingkat kesesuaian program yang diberikan dengan kondisi kebutuhan dalam program Klinik. Program pembinaan yang ada saat ini akan terus dikembangkan dan akan terus melayani kebutuhan masyarakat dalam pengembangan sektor KUMKM. Pengembangan koperasi sebagai badan usaha melalui program Klinik akan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dimana pengembangan usaha setiap tahunnya harus dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada.



b. Program Penyuluhan Kepada Koperasi

Gambar 5.2

Penyuluhan di Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung



Sumber : Dokumentasi Peneliti 28 Maret 2018

Pelaksanaan program ini dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan kelompok pemuda dalam bidang kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan koperasi yang menitik-beratkan kepada pengembangan usaha. Metode pelaksanaan program yang akan dilakukan adalah: (1) Pelatihan manajemen usaha, (2) Pelatihan pengelolaan pasar, (3) Pelatihan administrasi dan (4) Pendampingan. Semua metode ini merupakan satu kesatuan dari program Klinik. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penggunaan program Klinik di Koperasi Wanita Karya Mandiri dilakukan tanggal 18 Desember 2016 sampai 28 Juli 2017.

Kegiatan diisi dengan materi mengenai pengelolaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan pasar tradisional dan pengelolaan sampah limbah pasar yang berwawasan lingkungan. Peserta pelatihan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, dibuktikan dengan kedatangan mereka yang tepat waktu. Antusiasme juga terlihat dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri dan banyaknya pertanyaan yang diajukan seputar materi yang disampaikan. Meskipun sebenarnya diakhir sesi kegiatan disediakan waktu khusus untuk tanya jawab, namun ternyata beberapa peserta juga mengajukan pertanyaan disela-sela materi disampaikan.

Sebelum memulai penyampaian materi, pemateri terlebih dahulu memberikan beberapa pertanyaan sebagai pre-test. Pertanyaan tersebut diberikan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta dalam pengelolaan koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, pengelolaan pasar tradisional, pengolahan limbah pasar ikan dan sayur. Pertanyaan yang diberikan meliputi: Apakah sudah mengetahui koperasi simpan pinjam; Apakah sudah menjadi anggota koperasi simpan pinjam; Apakah sudah menggunakan fasilitas pinjaman di koperasi. Pertanyaan pre-test ternyata dijawab oleh peserta yang rata-rata sudah menjadi anggota koperasi.

Hal tersebut yang melatar belakangi peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Sesi terakhir dari pelatihan ini adalah sesi tanya-jawab, dimana para peserta secara aktif mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan

pasar tradisional, pembuatan kolam penetralisir air limbah ikan, pengolahan limbah pasar menjadi pupuk organik dan pakan ikan serta pakan ternak. Setelah sesi tanya jawab selesai, pemateri memberikan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta selama mengikuti pelatihan ini. Dari hasil post-test, peserta sudah memiliki gambaran keuntungan jika menjadi anggota koperasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu program penyuluhan Klinik KUMKM dilakukan di Dinas KUMKM yang terkait. Proses penyuluhan dapat dilakukan dimanapun sesuai dengan pihak yang mengundang. Proses penyuluhan biasanya dilakukan selama 2 hari dengan materi yang sudah disesuaikan dengan tema acara penyuluhan yang dibentuk oleh panitia. Dengan diberikannya penyuluhan, dapat memunculkan daya tarik masyarakat untuk berwirausaha dan anggota yang belum memiliki usaha menjadi termotivasi untuk mengikuti atau bahkan mempunyai inovasi dalam menciptakan usaha baru. Sehingga dapat meningkatkan kreatifitas anggota untuk bersaing dalam hal yang lebih positif.

c. Program Pendampingan Kepada Koperasi

Kemampuan kelompok wirausaha koperasi dalam merancang administrasi dan laporan keuangan sangat diperlukan agar proses pelaksanaan koperasi bisa berjalan dengan efektif. Kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan sangat diperlukan dalam kegiatan koperasi seperti mencatat arus kas dari proses usaha KUMKM. Kegiatan ini dilaksanakan secara khusus untuk membina

dan membekali pengelola agar mampu mengelola administrasi dengan benar. Pengelola KUMKM sebelum mendapat pelatihan mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan hanya melaporkan penjualan dan pembelian kemudian diselisihkan, tanpa melaporkan neraca dan laporan perubahan modal, serta tidak ada catatan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam pengelolaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa pengelola KUMKM yang belum mempunyai kemampuan merancang dan mengelola administrasi keuangan dengan baik dan benar. Kemampuan merancang dan mengelola administrasi keuangan secara baik dan benar dapat memperlancar proses pelaksanaan koperasi sehingga bisa berjalan dengan efektif. Dengan adanya pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan, maka laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan modal dan neraca tersusun dengan rapi. Pengelolaan administrasi dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, oleh karena itu perlu diadakan pengelolaan administrasi dan laporan secara komputerisasi.

Dalam pengembangan program Klinik dilakukan pendampingan pada sistem administrasi, dimana proses pendampingan dilakukan secara berkala sampai masyarakat mampu memahami sistem administrasi dalam pengembangan usaha, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan dalam pengembangan KUMKM. Dalam penerapan strategi yang dilakukan Dinas KUMKM melalui program Klinik guna mengembangkan

kualitas pengurus dan anggota koperasi dilakukan dengan beberapa kegiatan. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Pak Joko selaku Kepala Klinik KUMKM yang menjelaskan mengenai pembinaan yang diberikan oleh Dinas KUMKM pada koperasi yang mengalami permasalahan sebagai berikut :

“Mereka perlu pembinaan karena dalam perjalanannya Koperasi pasti mempunyai kendala, kemudian datang ke Dinas untuk melakukan pembinaan atau konsultasi dan mereka menginginkan inovasi yang baru serta berkeinginan untuk mengembangkan pengetahuan baru. Rata-rata informasi yang diperoleh dan paling tepat yaitu dengan cara mereka datang langsung ke dinas. Pemberian pembinaan yaitu melalui pelatihan seperti BIMTEK, *study* banding, *study* potensi, ataupun dalam pembinaan yang bersifat non formal”²

Pernyataan tersebut juga didukung hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bu Sunarti selaku Ketua Kopwan Karya Mandiri yang menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk mengembangkan kualitas para anggota Kopwan Karya Mandiri yaitu dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi anggota serta dengan menambah kualitas SDM dan wawasan atau pengetahuan mengenai pengembangan manajemen Koperasi untuk anggota. Karena anggota Kopwan membutuhkan pengalaman dan ketrampilan guna menambah pengetahuan serta memberikan berbagai pelatihan agar bisa mengembangkan usahanya bagi anggota yang mempunyai usaha untuk menambah uangsaku keluarga.”³

Program pengembangan sumber daya manusia berfokus pada (1) Pelatihan manajemen usaha, (2) Pelatihan pengelolaan pasar, (3) Pelatihan administrasi dan (4) Pendampingan. Program tersebut tentunya akan meningkatkan sumber daya manusia para pengurus dan

² Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Kepala Klinik KUMKM pada 12 April 2018 di Dinas KUMKM Tulungagung pukul 09.00 WIB.

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarti Ketua Kopwan Karya Mandiri, pada 09 April 2018 di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pukul 18.30 WIB.

anggota Koperasi dari sisi pengetahuan, keterampilan dan ketertiban administrasi guna mewujudkan Koperasi yang berkualitas. Program pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara berkala mulai dari kegiatan pelatihan pengelolaan usaha yang berisi tentang manajemen Koperasi, pengembangan sumber daya manusia pengurus Koperasi dengan memberikan sosialisasi tentang manajemen keuangan dan administrasi. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut maka ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan pada Koperasi dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan koperasi mulai dari manajemen pengelolaan dana dan pengembangan usaha. Dengan demikian, keberadaan Dinas KUMKM di Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan proses pembinaan, monitoring dan pengawasan dilakukan untuk menentukan keberhasilan program pembinaan di lapangan. Program yang baik tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan program tersebut akan menjadi sia-sia. Kualitas yang baik didapatkan dengan adanya kemampuan di bidang sektor usaha, pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai strategi pengembangan usaha.

5.2.2 Pemberian Modal Usaha (Permodalan)

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Dinas KUMKM kepada Koperasi Wanita Karya Mandiri dilakukan melalui pemberian

pinjaman modal yang setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut sesuai hasil wawancara peneliti Pak Joko selaku Kepala Klinik KUMKM yang menjelaskan sebagai berikut:

“Bantuan yang diberikan berupa dana awal dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang berbentuk donasi, Kopwan mendapatkan dua kali bantuan pendanaan yaitu yang pertama sebesar 25 juta pada tahun 2009 untuk seluruh Koperasi dan yang kedua donasi sebesar 25 juta pada tahun 2013 tidak semua mendapatkan melainkan dilihat dari kinerja Koperasinya. Selain bantuan dana dari Gubernur, Kopwan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa yang selalu mendukung pada setiap pelatihan yang diberikan Dinas. Secara mandiri mereka juga melakukan pelatihan sendiri dengan cara Kopwan menyisihkan anggaran dari sebagian dana pendidikan untuk *event* pelatihan pengembangan tersebut. Pemberian bantuan pendanaan tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim atas nama Kopwan yang bersangkutan dan yang berhak mengambil dana tersebut yaitu ketua dan bendahara, karena di rekening Koperasi atau neraca Koperasi biasanya terdapat kas bank.”⁴

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa koperasi Wanita Karya Mandiri sudah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan pendanaan tersebut diterima Koperasi Wanita Karya Mandiri sebagai bantuan Pemerintah kepada seluruh Koperasi, namun bantuan yang kedua merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Koperasi Wanita Karya Mandiri yang dinilai karena kinerjanya, sehingga Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap Koperasi guna meningkatkan kualitasnya.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Kepala Klinik KUMKM pada 12 April 2018 di Dinas KUMKM Tulungagung pukul 09.00 WIB.

Kinerja koperasi Wanita Karya Mandiri menunjukkan hasil yang baik, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memberikan apresiasi demi pemberdayaan dan perkembangan Koperasi menjadi lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan Koperasi melalui pencapaiannya dalam mengantarkan Koperasi menjadi tempat pemberdayaan khususnya bagi kalangan wanita. Mengingat wanita kerap menjadi pihak yang tertinggal dalam segala sektor, khususnya perekonomian. Dengan adanya Koperasi Wanita Karya Mandiri dapat menjadi wadah bagi para wanita untuk berperan serta dan aktif demi peningkatan ekonomi keluarga.

Pendataan yang diterima Koperasi Wanita Karya Mandiri memberikan peluang khususnya bagi anggota untuk membuka usaha mikro, sehingga dapat membantu menurunkan jumlah pengangguran karena adanya lapangan pekerjaan baru. Akan tetapi, demi mencapai hasil ini tentunya dihadapkan dengan berbagai proses yang tahapan yang wajib dipenuhi, mulai dari pengajuan proposal, pembentukan anggota, dan sebagainya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bu Susiani selaku bendahara Kopwan Karya Mandiri yang menjelaskan sebagai berikut :

“Modal berasal dari donasi Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu : Donasi 1 pada tahun 2009 : pemberian dilakukan bertahap sebanyak 2 gelombang tetapi sasaran langsung pada semua Kopwan yang ada di Kabupaten Tulungagung (sebesar 25 juta). Donasi 2 pada tahun 2013 : hanya diberikan kepada Koperasi berdasarkan kinerjanya sebesar 25 juta, pemberian dilakukan bertahap sebanyak 2 gelombang (tidak secara langsung semua Kopwan di setiap Desa memperoleh). Bantuan tersebut dikirim langsung ke rekening atas nama Kopwan yang terkait, pengambilan harus melalui penandatanganan dan hanya bisa

dilakukan oleh ketua beserta bendahara. Disamping itu Koperasi juga memberikan bantuan kepada anggota berupa dana simpan pinjam dan membantu memasarkan produk dari anggota (yang memiliki usaha).”⁵

Banyaknya proses yang harus dihadapi Koperasi guna mendapat bantuan pendanaan, tentunya kontribusi yang bisa diberikan kepada Koperasi juga besar. Salah satu manfaat dari pendanaan tersebut diantaranya adalah menghindarkan anggota untuk meminjam kepada rentenir sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bunga yang dipatok oleh rentenir terlalu besar, sehingga sangat menekan para peminjam. Dengan adanya pendanaan dari Pemerintah ini, tentunya anggota mempunyai kesempatan lebih besar untuk membuka usaha dengan bunga yang lebih kecil karena pendanaan didapatkan melalui Koperasi sendiri.

Selain itu, meningkatnya aset Koperasi Wanita Karya Mandiri juga tidak terlepas dari peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya, sehingga hal ini mendorong semakin tingginya pendanaan yang dapat dijadikan sebagai aset dalam pengembangan koperasi yang semakin baik, karena pada dasarnya Koperasi Wanita Karya Mandiri mempunyai iuran wajib anggota. Dengan semakin banyaknya anggota, tentunya modal yang bisa dikumpulkan dari iuran wajib anggota juga semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selain pendanaan yang didapatkan dari pemerintah baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung,

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Susiani Selaku Bendahara Kopwan Karya Mandiri, pada 09 April 2018 di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pukul 18.30 WIB.

Koperasi mempunyai anggaran dana yang berhasil dikumpulkan melalui iuran wajib para anggota. Apalagi jumlah anggota yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentunya memberikan kontribusi besar bagi pendanaan Koperasi. Peningkatan jumlah anggota tersebut sebagaimana data yang berhasil dikumpulkan peneliti selama proses pengambilan data di lapangan melalui laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2009 sampai tahun 2017. Adapun penjabaran penambahan jumlah anggota koperasi Wanita Karya Mandiri mulai tahun 2009 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri

Tahun	Jumlah Anggota
2009	25 anggota
2010	52 anggota
2011	71 anggota
2012	76 anggota
2013	81 anggota
2014	86 anggota
2015	101 anggota
2016	103 anggota
2017	110 anggota

Sumber: RAT koperasi Wanita Karya Mandiri tahun 2009-2017

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa modal awal sebesar 25 juta dari Gubernur yang diberikan kepada kelompok PKK Desa yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Modal tersebut berbentuk bantuan pendanaan yang dimaksudkan agar kelompok PKK tersebut berubah bentuk menjadi Koperasi. Pembentukan Koperasi ditujukan agar bantuan dana sebesar 25 juta tersebut dikelola berdasarkan landasan hukum yang legalitasnya formal. Setelah kelompok PKK berubah bentuk menjadi Koperasi pada tahun

2013 Gubernur kembali memberikan bantuan modal sebesar 25 juta. Akan tetapi pemberian bantuan tersebut bersyarat, yaitu hanya diperuntukkan bagi Koperasi yang pengelolaan dan kinerjanya baik.

Permodalan dalam bentuk bantuan pendanaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia usaha, tetapi bukan tergolong utama untuk mendapatkan dukungan keuangan dari perbankan dan dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan digunakan sebagai modal awal, melainkan untuk modal pengembangan setelah usaha yang dirintis dapat menunjukkan prospek yang tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian pemberian modal hanya sebatas modal awal sebesar 25 juta serta modal yang bersifat pengembangan dan berkelanjutan sehingga hasilnya diharapkan akan dapat maksimal. Pemberian modal oleh pemerintah pada sektor koperasi sangat membantu dalam proses operasional koperasi khususnya koperasi yang baru tumbuh dan berkembang, sehingga diharapkan modal diberikan yaitu secara berkelanjutan. Selain itu, adanya pemberian modal yang sifatnya berkelanjutan akan terus dilakukan jika kinerja koperasi yang dihasilkan baik. Adapun jumlah modal yang diberikan bagi Koperasi adalah bantuan pendanaan sebesar 10 juta yang berasal dari DPRD guna memodali anggota dalam melakukan usaha yang akan dilakukan selanjutnya agar usaha tersebut dapat semakin berkembang.

Pada buku laporan RAT Koperasi terdapat rincian mengenai perkembangan permodalan yang berisi tentang Kekayaan bersih/Modal sendiri dan Kewajiban lancar/Modal luar. Kekayaan bersih/modal sendiri meliputi : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Donasi, Cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan Kewajiban lancar/Modal luar berisi : Dana Pendidikan, Dana Sosial, Simpanan Sukarela, Simpanan Khusus dan Biaya yang harus dibayarkan. Untuk tahun 2009 Koperasi mendapatkan bantuan modal dari Gubernur Provinsi Jawa Timur sebesar 50 juta (25 juta sebanyak dua kali) dengan jumlah awal anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri yaitu sebanyak 25 orang. Untuk Tahun 2010 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



5.2.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menurut Yoeti adalah fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa sarana dan prasarana sangatlah penting bagi sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi media atau sarana mempermudah pekerjaan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting akan tetapi dalam hal ini Dinas KUMKM hanya memberikan beberapa fasilitas tertentu. Adapun sarana dan prasarana didapatkan dengan membeli pribadi dan dibantu oleh pihak yang lain.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Joko selaku Kepala Klinik KUMKM yang menjelaskan sebagai berikut :

“Sejak awal bergulirnya program dari Provinsi Jawa Timur sudah langsung dimulai, Kopwan secara tidak langsung mendapatkan prioritas untuk memperoleh sarana prasarana pendampingan terutama di bidang pelatihan pembukuan, pelatihan manajemen kelembagaan keuangan. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 lumayan maksimal sampai hari ini masih tetap di lakukan karena kualitas SDM masyarakat yang terbatas maka di lakukan secara terus menerus walaupun materinya setiap tahun hampir sama akan tetapi tidak menjadi masalah guna meningkatkan kapasitas SDM masyarakat. Dalam melakukan pelatihan kan membutuhkan LCD atau laptop nah kalau dulu kan pinjam tapi waktu tahun 2010 alhamdulillah bisa beli laptop ”⁷

⁶ Yoeti. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung :Angkasa, hal.344.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Kepala Klinik KUMKM pada 12 April 2018 di Dinas KUMKM Tulungagung pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah dalam melakukan pelatihan sumber daya manusia dan pembuatan laporan maka kompuer atau laptop adalah salah satu media yang sangat dibutuhkan. Dalam pengembangan sarana dan prasarana awalnya adalah melakukan pembelian atas kesepakatan dengan para anggota Koperasi. Hasil wawancara diatas juga didukung dengan penjelasan dari Bu Sulikah selaku Sekretaris Koperasi Wanita Karya Mandiri yang menjelaskan sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana yang dimiliki koperai wanita kita itu kalau sekarang sudah ada dan lumayan lengkap. Misalnya dalam kantor semua fasilitasnya sudah ada, alat-alat pelatihan juga sudah ada. Adapun kami membelinya dari keuntungan waktu menjualkan produk atau pakai iuran wajib anggota tapi atas kesepakatan bersama. Untuk sarana dana prasarana juga kadang dibantu oleh pihak lain.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana terus di kembangkan. Fasilitas yang diberikan berupa tabungan (simpanan wajib dan pokok) setiap bulan dari anggota, pemberian bantuan berupa pinjaman dana bagi masyarakat, pemberian bantuan kepada anggota untuk memasarkan produk usahanya serta pemberian dana sosial. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu melalui pengumpulan anggaran yang digunakan untuk membeli atau melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja Koperasi. Adapun perlengkapan tersebut

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sulikah Selaku Sekretaris Kopwan Karya Mandiri, pada 09 April 2018 di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pukul 18.30 WIB.

didapatkan melalui keuntungan Koperasi maupun bantuan dari berbagai pihak yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pada awal berdirinya Koperasi Wanita Karya Mandiri belum memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkoperasian. Kemudian pada tahun 2011 mereka membeli *Laptop* guna mempermudah proses administrasi. Selain itu perabot dan peralatan kerja seperti kursi, meja kerja dan lain-lain juga turut dilengkapi. Selain peralatan tersebut, perkembangan luas ruangan juga diperlebar guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi anggota Koperasi. Seluruh inventaris dan peralatan atau sarana tersebut bersumber dari dana sendiri.

Pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Karya Mandiri yaitu dengan cara bertahap. Adapun anggaran yang digunakan untuk melakukan pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara mandiri melalui keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi dari penjualan produk, iuran wajib atas kesepakatan bersama. Selain itu juga pengembangan sarana dan prasarana yang dibantu oleh pemerintah secara nonfisik adalah segala sesuatu yang bersifat mempermudah dan memperlancar kegiatan misalnya bantuan pemerintah dengan memberikan uang, waktu, kepercayaan dan sebagainya. Koperasi Wanita Karya Mandiri memiliki unit usaha produksi pengolahan makanan. Selain pengembangan sarana dan prasarana dalam bentuk bantuan, pengurus Koperasi juga menyediakan alat-alat guna membantu proses produksi dalam menunjang usaha yang

dilakukan oleh anggotanya. Bantuan tersebut berupa penyediaan alat alat sederhana seperti alat penggiling, blander, untuk menunjang produksi dari anggota khususnya pada industri makanan ringan dan mie.

5.2.4 Penyedia Informasi Tepat Guna

Penyediaan informasi tersebut dilakukan langsung oleh Dinas KUMKM kepada Koperasi dengan melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM disebutkan seperti pada hasil wawancara dengan Bu Misrini selaku anggota Klinik KUMKM sebagai berikut:

“Penyuluhan dilakukan pada waktu awal pendirian Koperasi dengan mendatangkan seluruh pengurus dan anggota Koperasi terkait. Pendampingan terus dilakukan selama pengurus dan anggota mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya. Pelatihan juga terus dilakukan selama pengurus dan anggota memerlukan bantuan dalam penyusunan pembukuan, laporan penyusunan keuangan dan pengembangan usaha. Karena dengan hal tersebut dapat mengontrol terhadap keberlangsungan yang berkaitan dengan pendanaan.”⁹

Selanjutnya Bu Misrini menjelaskan mengenai informasi yang diberikan oleh Dinas KUMKM sebagai berikut :

“Media informasi yang digunakan yaitu melalui : Konsultasi secara langsung ke Dinas KUMKM, pelatihan Bimbingan Teknologi, pembinaan yang dilakukan pihak Dinas KUMKM dengan berkunjung ke Kopwan yang terkait dan *Study* Potensi. Sedangkan informasi yang diberikan berupa : berkaitan dengan perkoperasian yaitu mengenai kelembagaan, pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha melalui *study* potensi.”¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Misrini Selaku Anggota Klinik KUMKM pada 12 April 2018 di Dinas KUMKM Tulungagung pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Loc.cit

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemberian informasi secara tidak langsung yang dimaksud adalah disediakannnya *website* dan grup *whatsapp* khusus tentang perkoperasian yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi masih ada beberapa pengurus dan anggota Koperasi yang belum bisa mengakses, maka dari itu informasi juga diberikan secara langsung. Pemberian informasi secara langsung meliputi konsultasi langsung (*person to person*) serta pemberian pelatihan Bimbingan Teknologi bagi pengurus ataupun anggota Koperasi tergantung jenis kebutuhannya.

Selain itu juga, semakin majunya teknologi dan komunikasi akan memudahkan antar anggota untuk melakukan diskusi atau memberikan informasi-informasi penting. Adanya teknologi komunikasi yang efektif akan dapat membantu dalam memberikan informasi yang mudah dan cepat. Salah satu teknologi tepat guna yang digunakan oleh koperasi Wanita Karya Mandiri adalah dengan membuat group dalam sebuah aplikasi *Whatsapp*.

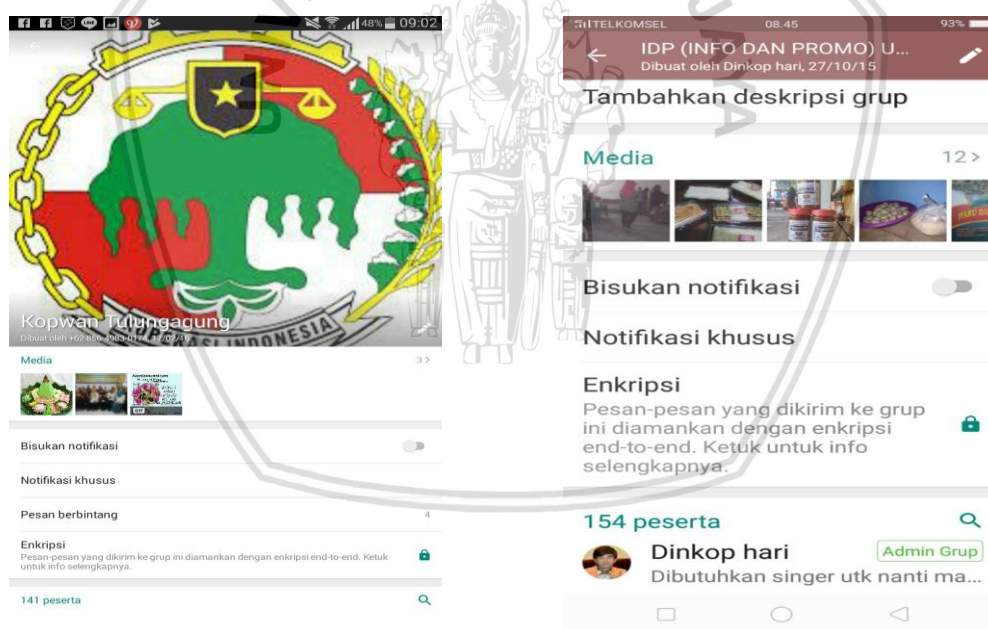
Hal tersebut seperti hasil wawancara dengan Bu Susiani selaku bendahara Kopwan Karya Mandiri sebagai berikut :

“Ya mas sekarang kebanyakan orang sudah memakai hp android, jadi jarang yang tidak memakai. Salah satu aplikasi sosial media yang banyak digunakan oleh individu maupun kelompok adalah dengan menggunakan *whatsapp*. Kalau memakai *whatsapp* satu kali mengirim informasi maka semua anggota akan mendapatkan

informasinya. Hal ini sangat membantu sekali untuk memberikan informasi terbaru dengan cepat dan efisien.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mempermudah hubungan komunikasi antar anggota Koperasi Wanita Karya Mandiri menggunakan sebuah aplikasi bernama *whatsapp*. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada anggota dengan cepat dan efisien. Adapun grup *whatsapp* dibuat langsung oleh pengurus Koperasi dan seluruh anggota tanpa terkecuali masuk dalam grup tersebut. Adapun gambar grup *whatsapp* Koperasi Wanita Karya Mandiri dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.5 *Screen Shoot* grup *whatsapp* Koperasi Wanita



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Susiani Selaku Bendahara Kopwan Karya Mandiri, pada 09 April 2018 di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan teori pemberdayaan penyediaan informasi tepat guna berorientasi pada ketersediaan informasi merupakan kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan serta kebijakan yang ditemukan diantara individu atau dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi yang lebih efektif. Teknologi tepat guna menurut Imam merupakan sebuah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.¹² Penyediaan informasi tersebut dapat dipenuhi dengan komputer, internet dan *handpone* (jejaring media sosial). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung telah membuat *website* serta Koperasi Wanita Karya Mandiri telah memanfaatkan grup *whatsapp* yang digunakan untuk menyediakan informasi kepada para pengurus dan anggota Koperasi. Sehingga jika terdapat informasi yang penting maka akan dapat langsung dibagikan kepada pengurus maupun anggota Koperasi.

5.2.5 Pengelolaan Kelembagaan

Dalam menjalankan sebuah organisasi, pengelolaan kelembagaan merupakan salah satu hal yang harus ada. Pengelolaam organisasi memiliki banyak fungsi diantaranya: Perencanaan yang digunakan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil seperti menetapkan sasaran kegiatan organisasi; Bagaimana target tersebut terpenuhi serta

¹² Imam. 2001. Pedoman Teknologi Tepat Guna Ergonomi Bagi Pekerja. Sektor Informal. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Strategi apa yang harus dipakai dan mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bu Sunarti selaku Ketua Kopwan Karya Mandiri yang menjelaskan sebagai berikut:

“Yang menjadi pengurus berasal dari anggota serta pemilihan dilakukan oleh anggota pada waktu rapat anggota dan pergantian pengurus dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan mengkader anggota. Sebelum pengurusan kita mengkader anggota terlebih dulu setelah itu baru naik ke pengurus. Mekanisme pemilihan pengurus yaitu pergantian dilakukan secara bergantian atau berjenjang misalnya ketua diganti terlebih dahulu kemudian sekretaris atau bendahara baru diganti pada tahun berikutnya dalam artian pergantian dilakukan tidak secara bersamaan.”¹³

Selanjutnya Bu Sunarti menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam keberlangsungan pengelolaan kelembagaan sebagai berikut :

“Faktor yang mendukung berjalannya pengelolaan kelembagaan Kopwan karya mandiri yaitu kerjasama yang baik antar ketua, pengurus, pengawas dan anggota untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dialami Koperasi melalui cara musyawarah atau rapat. Sedangkan faktor yang menghambat berjalannya kelembagaan yaitu simpan pinjam dari anggota yang tidak lancar karena dapat menyebabkan pengelolaan pendanaan koperasi akan macet. Rutin menagih simpanan wajib dan pokok secara baik atau perlahan agar anggota tidak tersinggung serta menghindarkan dari perselisihan.”¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelembagaan. Faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berjalannya pengelolaan kelembagaan meliputi kerjasama dan komunikasi yang baik antar ketua, pengurus, pengawas dan anggota

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarti Ketua Kopwan Karya Mandiri, pada 09 April 2018 di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pukul 18.30 WIB.

¹⁴ Loc.cit

Koperasi sehingga tercipta solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang muncul. Faktor penghambatnya adalah pendanaan dari anggota Koperasi yang tidak lancar sehingga pengurus harus rutin menagih secara baik-baik agar tidak tersinggung dan terhindar dari perselisihan. Pengelolaan kelembagaan di Koperasi Wanita Karya Mandiri hanya sebatas pada pengkaderan pengurus baru, sedangkan menurut teori pemberdayaan proses kelembagaan dapat dilakukan dengan penyediaan yang tidak hanya berfokus kepada pengurus saja melainkan juga membentuk kelompok anggota untuk mengembangkan usaha. Adanya pengembangan kelembagaan ini adalah untuk membantu membuat kelembagaan eksternal dimana para anggota Koperasi dikelompokkan dan dibuatkan lembaga sesuai unit usahanya, contohnya terdapat kelompok anggota peternak sapi perah yang diberikan pelatihan atau seminar mengenai tatacara pengolahan keju yang sederhana dan mudah. Hal tersebut dilakukan agar anggota lebih kreatif dan memiliki inovasi dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalani secara mandiri.

Pengelolaan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan lembaga Koperasi yang berkualitas dan sehat melalui kegiatan yang meliputi perencanaan kelembagaan (pembentukan struktur organisasi). Pembentukan struktur organisasi yang lengkap dan jelas sekaligus pembagian tugas menjadi tolok ukur lembaga yang sehat. Setelah struktur dan pengurus Koperasi terbentuk selanjutnya pengelolaan kelembagaan melakukan pengkaderan anggota dan pembimbingan anggota Koperasi. Pengkaderan dilakukan guna menghasilkan pengurus

Koperasi yang berkualitas dan kompeten. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan pengembangan kelembagaan eksternal. Kelembagaan eksternal berfungsi untuk mengakomodir kegiatan anggota Koperasi agar program-program yang dikembangkan Koperasi dapat diterima secara efektif dan efisien.

5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada Program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas

5.3.1 Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan tentang kinerja Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung dalam hal pembinaan, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja KUMKM itu sendiri. Karena pegawai lah yang melakukan pembinaan terhadap Koperasi. Faktor sumber daya manusia yang dimaksud yaitu ketersediaan jumlah pegawai. Ketersediaan pegawai yang cukup dapat membantu didalam menjalankan tugas.

Perkembangan Koperasi merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan pembinaan yang dilakukan dari Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung. Karena perkembangan Koperasi dapat menunjukan kinerja dari Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung. Perkembangan Koperasi yang

dimaksud adalah terus tumbuh dan berjalannya segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi-koperasi yang ada.

Berkembangnya atau terhambatnya perkembangan Koperasi ditentukan oleh berjalan atau tidaknya usaha-usaha yang dilakukan. Ada beberapa Koperasi yang berhasil menjalankan usahanya dan ada yang sulit untuk menjalankan usahanya. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dari Koperasi tersebut. Dan sekaligus juga menjadi penghambat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor Koperasi karena gagalnya usaha yang dilakukan.

Walaupun Dinas KUMKM sudah membina dengan semaksimal mungkin akan tetapi jika usaha yang dilakukan Koperasi tidak berjalan tentunya sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi tujuan dari Dinas KUMKM untuk melakukan pembinaan. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam sebuah Koperasi. Disebut demikian karena memiliki unsur yang berbeda antara satu sama lain yakni keterampilan atau kecerdasan, motivasi serta watak atau keperibadian. Disamping faktor keperibadian, mereka juga memiliki keterbatasan maupun kelebihan yang berbeda dalam berbagai hal seperti kecakapan atau kecerdasan, kerjasama, kompetensi, adaptasi, sikap dan lain-lain.

b. Anggaran Pegawai Dinas

Dalam aktivitas usaha apapun, modal sangat dibutuhkan. Modal yang dimaksud adalah dana yang akan digunakan untuk aktivitas

Koperasi. Didalam Koperasi ada ketentuan khusus bahwa modal berasal dari berbagai sumber diantaranya dari anggota, dari pinjaman ataupun dari hibah. Terbatasnya alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan peningkatan kemampuan aparatur akan mengakibatkan upaya untuk menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi profesional tidak mencakup kepada semua aparatur. Pada akhirnya upaya untuk meningkatkan kinerja masih kurang optimal. Walaupun usaha peningkatan kemampuan yang dilakukan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas aparatur namun peningkatan tersebut belum mencerminkan hasil yang diharapkan.

c. Sistem atau Perencanaan Program

Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi Koperasi yang harus ada untuk mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, serta mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian. Sistem akan mengatur setiap unsur didalam Koperasi agar dapat melaksanakan pekerjaan tanpa keraguan karena sudah memiliki dasar bertindak dan prosedur pelaksanaan yang dijamin keabsahannya.

Perangkat kelengkapan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan aktivitas usaha. Prasarana merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi Koperasi misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha. Sedangkan sarana adalah kebutuhan yang diperlukan oleh Koperasi untuk dapat beroperasi dengan baik. Sarana dibedakan menjadi dua jenis yakni: Sarana fisik

dan Sarana non-fisik. Sarana fisik meliputi berbagai perangkat pokok untuk pelaksanaan aktivitas Koperasi misalnya peralatan kantor, sarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan sarana non-fisik berupa perangkat lunak untuk membantu aktivitas Koperasi agar bisa berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat misalnya program komputer untuk pembukuan, sistem administrasi, dan sistem lainnya.

5.3.2 Faktor Penghambat

a. Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Anggota Koperasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, kebutuhan, penghargaan dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan atau pelayanan, kelembagaan, struktur atau stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan dan sarana atau prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program Klinik dalam pengembangan KUMKM masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pinjaman. Sarana dan prasarana modal peminjaman juga memiliki kendala dalam pemberian untuk permodalan KUMKM.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kabupaten Tulungagung melalui program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas dilakukan dengan cara pengembangan Sumber Daya Manusia sudah dilakukan dengan baik yaitu melalui program pembinaan, program penyuluhan serta program pendampingan kepada anggota dan pengurus Koperasi. Pemberian modal usaha (permodalan) belum terlalu maksimal karena hanya dilakukan dua tahap dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap. Pengembangan sarana dan prasarana masih kurang maksimal karena tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, oleh karena itu hanya berupa fasilitas tabungan (simpanan wajib dan pokok) dan pemberian unit usaha produksi pengolahan makanan yang disediakan atau berasal dari Koperasi sendiri.

Selanjutnya adalah dengan cara penyedia informasi tepat guna sudah maksimal yaitu melalui pemberian informasi secara tidak langsung yang dimaksud adalah disediakannya *website* dan grup *whatsapp* serta pemberian informasi secara langsung yaitu konsultasi secara langsung ke Dinas KUMKM Kabupaten Tulungagung. Dan yang terakhir adalah Pengelolaan Kelembagaan

sudah baik melalui kegiatan perencanaan kelembagaan (pembentukan struktur organisasi), pengembangan kelembagaan ini adalah untuk membantu membuat kelembagaan eksternal, dan melakukan kegiatan mengkader anggota Koperasi. *Kedua*, Faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung pada program Klinik dalam mewujudkan Koperasi yang berkualitas.

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas yang berkualitas walaupun dari sisi jumlah yang berkurang.
- 2) Memiliki perencanaan anggaran yang baik walaupun anggaran terbatas.
- 3) Memiliki Sistem atau perencanaan program kerja yang berkelanjutan dan saling berkesinambungan antara program satu dengan yang lain.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

- a) Sumber daya manusia pegawai yang masih kurang memadai dalam segi jumlah sehingga proses kinerja di Dinas KUMKM masih sedikit terhambat.
- b) Terbatasnya alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan peningkatan kemampuan aparatur sehingga upaya peningkatan pengembangan KUMKM masih belum berjalan dengan baik.
- c) Peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana untuk pelatihan maupun kegiatan sehari-hari sudah dapat terpenuhi.

2) Faktor Eksternal

- a) Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam proses pembayaran pinjaman.
- b) Masih ada beberapa masyarakat yang kurang tertarik untuk mengembangkan usahanya karena proses permodalan yang masih tidak memenuhi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka didapatkan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam kepegawaian maka dapat dilakukannya perekrutan SDM baru dan melakukan pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan secara berkala.
2. Pemberian dana disesuaikan dengan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan denda terhadap masyarakat yang tidak melakukan pembayaran dalam peminjaman.